

EDISI 26 / DESEMBER 2020

*Masyarakat*

# ASEAN



**Investing  
on Women  
and Youth**

**04**

MAJU  
PEMUDA DAN  
PEREMPUAN,  
MAJU ASEAN

**26**

INNOVATIVE  
INVESTING ON  
WOMEN  
ENTREPRENEURS

**39**

BOKATOR: SENI  
BELA DIRI PURBA  
YANG TERANCAM  
PUNAH



# DAFTAR ISI

## PERSPEKTIF

Maju Pemuda dan Perempuan,  
Maju ASEAN | **04**

## LAPORAN UTAMA

KTT ASEAN Ke-37  
Pemimpin ASEAN Satukan Langkah  
Memulihkan Kawasan | **06**

## LAPORAN KHUSUS

Pemuda dalam Krisis Covid-19 | **11**

## OPINI

Menangkap Peluang Implementasi RCEP  
bagi Indonesia | **15**

## WAWANCARA

Yuyun Wahyuningrum,  
Hak Asasi Manusia dan ASEAN | **18**

## REPORTASE

53 Tahun ASEAN, Tantangan untuk  
Menjaga Relevansi | **24**

## POJOK PSA

Innovative Investing on  
Women Entrepreneurs | **26**

## POJOK BAHASA

Bahasa Khmer Kamboja | **30**

## SERBA SERBI

Melting Pot: Warna-Warni  
Busana Asia Tenggara | **32**

Nom Banh Chok, Mi Khas Kamboja | **37**

Bokator: Seni Bela Diri Purba yang  
Terancam Punah | **39**

## GALERI FOTO

Bali Democracy Students Conference  
IV, 2020 | **41**

## INFOGRAFIS | 42

### PENANGGUNG JAWAB

Direktur Jenderal Kerja Sama  
ASEAN

### REDAKTUR

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kerja Sama ASEAN

### PENYUNTING/EDITOR

Rahmat Azhari  
Avi Dewani S. Harahap  
Annisa A. Sophiany

### DESAIN GRAFIS/FOTOGRAFER

Aswandi  
Syarifah Nadya Mahdini

### SEKRETARIAT

Mulyanto  
Heriyadi Setiawan  
Iman Heri Patwono  
Sasi Harianti  
Khusnul Khatimah  
Yangyang

### PEMBUAT ARTIKEL

Carolina Tinangon  
Adhitya Wisada  
Nanda Tri Harahap  
Ahmad Fahriza  
Annisa Amrih Sophiany  
Audy Akbar Hasibuan  
Yuliana Riana Prasetyawati, M.M.  
Janita Jaya  
Medila Putri  
A. Yathriba  
Ivan Namanto  
Ika Permata Sari

### ALAMAT REDAKSI

Direktorat Jenderal  
Kerja Sama ASEAN  
Kementerian Luar Negeri  
Jl. Taman Pejambon No.6,  
Jakarta Pusat  
Telp. 021 - 3509050 / 3509059  
Fax. 021 - 3509050

# MAJU PEMUDA DAN PEREMPUAN, MAJU ASEAN

Carolina Tinangon,  
Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN



Sumber: Kementerian Luar Negeri RI

**Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah dengan populasi hampir 650 juta jiwa, yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya, kelompok umur, ras dan pekerjaan.**

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Pemuda Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), terdapat sekitar 213 juta pemuda (15-34 tahun) di kawasan ini. Diperkirakan pada 2038, populasi pemuda di kawasan ASEAN akan melebihi angka 220 juta.

Jumlah pemuda yang tinggi akan bermanfaat untuk merealisasikan visi ASEAN 2025 dan pencapaian Sustainable Development Goals 2030. Masa depan ASEAN terletak pada kapabilitas para anak mudanya.

Pemuda merupakan calon pemimpin masa depan ASEAN dan merupakan aset sumber daya yang penting. Berinvestasi pada pengembangan kaum muda merupakan hal penting demi terciptanya kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera.

Sayangnya, angka tersebut masih terbatas sebagai potensi. Tingkat pengangguran pemuda usia 15-34 tahun kawasan ASEAN masih sekitar 6,9 persen. Tak hanya itu. Juga masih ada kesenjangan di mana perempuan dalam golongan usia tersebut

mendapat kesempatan lebih rendah dibanding daripada laki-laki.

Para pemimpin ASEAN pun telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh anak muda dan membangun kerja sama dengan mitra eksternal ASEAN dalam upaya pengembangan pemuda di kawasan. Perwujudan masyarakat ASEAN yang inklusif hanya dapat dicapai dengan mendorong isu kesetaraan gender melalui pendidikan dan penciptaan peluang kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan, juga kelompok gender lain.

Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19. Upaya pemberdayaan pemuda dan perempuan akan menjadi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi dan juga meningkatkan ketahanan kawasan untuk menghadapi tantangan masa depan.

## ASEAN DAN PEMUDA

Sejak awal pembentukan pada 1967, ASEAN telah menyadari betapa pentingnya pemuda untuk mendorong perkembangan di kawasan. Para pemuda merupakan calon pemimpin yang diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan ASEAN yang telah dibentuk oleh pendiri. Kaum muda adalah kekuatan utama masyarakat ASEAN, yang dapat berperan untuk menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19 dan upaya pemulihannya, serta tantangan di masa depan.

Pada 2015, ASEAN telah mengadopsi ASEAN Socio-Cultural Community 2025 yang salah satu tujuannya untuk menciptakan komunitas inklusif yang mempromosikan kualitas hidup yang tinggi, akses terhadap peluang yang adil, serta berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam penerapannya, ASEAN telah merancang Cetak Biru ASEAN Socio-Cultural Community 2025 Blueprint yang juga memiliki fokus pada pengembangan pemuda dan perempuan di kawasan.

Beberapa inisiatif telah diluncurkan untuk mengembangkan potensi dan kesempatan bagi para pemuda di ASEAN, di antaranya:

1. Rencana Kerja Pemuda ASEAN (*ASEAN Work Plan of Youth*) yang memiliki fokus pada upaya pengembangan kapasitas dalam ranah kewirausahaan;
2. Kewirausahaan Pemuda (*Youth Entrepreneurship*). Inisiatif ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kreativitas dan teknologi inovasi sangat dekat dengan generasi muda, yang dapat dijadikan asset dalam pengembangan usaha dan bisnis di ASEAN;
3. Kemampuan Revolusi Industri untuk Pemuda (*Industrial Revolution Skill for Youth*), menghadapi dunia masa depan dengan teknologi mutakhir. Peningkatan kapasitas pengetahuan dan kemampuan akan menjadi kunci utama untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul.

ASEAN juga telah menjalin kerja sama dengan mitra wicara untuk mengupayakan peningkatan kapasitas kaum mudanya. Di antaranya dengan beberapa inisiatif seperti beasiswa untuk belajar di negara-negara mitra wicara seperti USAID, Genesys, EU-SHARE, SEED, dan lain-lain.)

## ASEAN DAN PEREMPUAN

Selain pemuda, perempuan juga aktor penting yang menyokong ASEAN memenuhi visinya. Sebagai kawasan dengan jumlah perempuan sebanyak 321 juta jiwa, pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) merupakan salah satu agenda utama dari organisasi ini.

Pada Rangkaian KTT ASEAN ke-37 dan KTT Terkait lainnya, ASEAN mengadakan *ASEAN Women's Leader Summit* yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin perempuan dari ASEAN dan Mitra Wicara, termasuk Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. KTT tersebut bertujuan untuk meng-*highlight* peran perempuan di kawasan. Pada pidatonya, Menlu

RI menegaskan bahwa ASEAN harus dapat menciptakan *enabling environment* dan kesempatan yang sama untuk perempuan serta pentingnya untuk merubah cara berpikir dalam mengupayakan pengarusutamaan *gender*. Pencapaian *gender equality* merupakan salah satu cara untuk membentuk kawasan yang stabil dan *resilient*.

Dari waktu ke waktu, ASEAN terus berusaha memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terus berkembang, baik dalam sektor ekonomi maupun keamanan dan perdamaian. Di kawasan kerja lembaga ini telah berdiri *ASEAN Women for Peace Registry* (AWPR) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian.

Dalam sektor ekonomi, ASEAN mendukung perkembangan perempuan melalui pembentukan ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN); jejaring pebisnis perempuan di kawasan yang salah satu tujuannya untuk memberdayakan dan memperkuat kewirausahaan bagi perempuan ASEAN, serta menciptakan lingkungan yang mendukung usaha mereka di kawasan. Peranan perempuan dalam memberikan kontribusi pada upaya pemulihan ekonomi signifikan, terutama ditengah Pandemi Covid-19. Berkembangnya bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi yang diinisiasi oleh kaum perempuan telah membantu menggerakkan roda perekonomian.

## WAY FORWARD

Ke depannya, ASEAN mesti kian meluaskan inisiatif-inisiatif kegiatan yang mengakomodasi kepentingan pemuda dan perempuan. Inisiatif-inisiatif tersebut diharapkan yang lebih konkret, berorientasi tindakan dan inklusif. Tentu ini juga bisa dengan meluaskan kerja sama yang telah ada dengan negara-negara mitra. Misalnya saja ASEAN bisa menjajaki program beasiswa Pelatihan dan Pendidikan Vokasi dan Teknik (TVET) dan berbagai pelatihan terkait ekonomi digital.

# KTT ASEAN KE-37: PEMIMPIN ASEAN SATUKAN LANGKAH MEMULIHKAN KAWASAN

Adhitya Wisadha, Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN



Sumber: ASEAN.org

## KTT ASEAN ke-37 sukses terselenggara pada 12 November 2020 melalui konferensi video.

Dari depan layar konferensi video di negara masing-masing, sepuluh pemimpin negara anggota ASEAN memulai rangkaian KTT ASEAN Pleno dan KTT ASEAN bersama negara Mitra Wicara. Pada pertemuan tingkat tinggi ini, Vietnam selaku Ketua ASEAN 2020 telah menyesuaikan pelaksanaan pertemuan yang biasanya dilakukan secara tatap muka menjadi pertemuan daring. Hal ini seiring dengan upaya regional dalam merespons kelanjutan proses pembangunan masyarakat ASEAN dan tanggap darurat Covid-19 di kawasan.

Selain tetap melanjutkan upaya penanganan pandemi, para pemimpin ASEAN juga berfokus

pada inisiatif kunci dalam proses pembangunan masyarakat ASEAN, termasuk penciptaan kerangka kerja pemulihan komprehensif di kawasan hingga integrasi ekonomi dengan pasar terbesar di dunia melalui penandatanganan Regional Comprehensive Economic Framework (RCEP).

Pada KTT ASEAN ke-37, Presiden RI Joko Widodo juga mendorong adanya optimisme pemulihan ekonomi di kawasan melalui sejumlah inisiatif kunci yang digawangi oleh Indonesia, seperti disepakatinya ASEAN Declaration on an ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework. Presiden Joko Widodo juga secara konsisten mendorong stabilitas dan keseimbangan kawasan di tengah rivalitas kekuatan besar dunia yang terus mewarnai dinamika geopolitik dan geoeкономи di kawasan.

Pertemuan Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-37 ASEAN dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xun Phuc sebagai Ketua ASEAN 2020 dan dihadiri oleh kepala negara/pemerintahan negara

anggota ASEAN serta Sekretaris Jenderal ASEAN. Direktur Jenderal WHO juga diundang untuk memberikan paparan singkat seputar penanganan pandemi global. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) untuk ASEAN.

### MEMBANGUN VISI ASEAN PASCA-2025

KTT ASEAN ke-37 yang dibarengi oleh sejumlah pertemuan tingkat tinggi dengan Mitra Wicara ASEAN merupakan momentum penting pada 2020 sekaligus pengujung keberhasilan keketuaan Vietnam di ASEAN dalam mengelat berbagai pertemuan penting yang mewujudkan tema keketuaan mereka yakni "Cohesive and Responsive" dalam upaya tanggap darurat Covid-19.

Pertemuan Tingkat Tinggi ini dapat dikatakan telah bergaung di komunitas internasional bahwa soliditas dan sentralitas ASEAN tetap relevan di tengah ketidakpastian global,



Sumber: ASEAN.org

penurunan multilateralisme, rivalitas kekuatan besar, dan pandemi global. ASEAN juga berhasil mempertahankan momentum kerja sama intra-blok, memperluas dan memperdalam hubungan antara ASEAN dan negara Mitra Wicara, serta mempromosikan sentralitas regional. Pada kesempatan ini, ASEAN tetap memastikan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 tetap berjalan di sepuluh negara ASEAN. Pertemuan tersebut juga membahas masalah regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama.

Melalui pertemuan ini, para pemimpin ASEAN telah mengukuhkan visi ASEAN sebagai kompas regional melalui implementasi tiga Cetak Biru Visi Masyarakat ASEAN 2025. Visi Masyarakat ASEAN yang telah diwujudkan melalui tiga Cetak Biru Implementasi Visi Masyarakat ASEAN 2025 sukses melewati *mid-term review* dan menorehkan keberhasilan implementasi yang signifikan sebelum tahun capaian 2025.

Memandang visi ASEAN ke depan, pada KTT ASEAN ke-37 ini, para pemimpin ASEAN mengeluarkan Ha Noi Declaration on the ASEAN Community's Post-2025 Vision yang merupakan dasar penting bagi kawasan untuk memulai membangun visi setelah tahun capaian 2025 terpenuhi. Berangkat dari KTT ASEAN ke-37, penentuan visi ke depan menjadi strategis karena melihat tantangan regional dan global, serta kesempatan untuk memajukan Tiga Pilar ASEAN, yakni pilar politik keamanan, sosial budaya, dan ekonomi ke depan.

Selain itu, diadopsinya Narrative of ASEAN Identity yang diusung oleh Indonesia juga memperkuat Visi Komunitas ASEAN 2025. ASEAN tetap berkomitmen kuat untuk mewujudkan ASEAN yang berbasis aturan, berorientasi pada manusia, dan berpusat pada rakyat "Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas". Konstruksi narasi ini penting dalam memperkuat dan mempererat ikatan di antara masyarakat ASEAN.

### COVID-19 DAN MULTILATERALISME

Pertemuan pleno KTT ASEAN ke-37 juga dihadiri oleh Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang mengapresiasi upaya kolektif ASEAN dalam merespons pandemi. WHO memandang upaya regional tepat, komprehensif, efektif, dan mengedepankan *evidence-based* dan merupakan wujud nyata bahwa penanganan pandemi dan dampaknya perlu diatasi secara kolektif.

Direktur Jenderal WHO juga menekankan pentingnya dukungan global terhadap Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator, merupakan kolaborasi global baru yang inovatif untuk mempercepat pengembangan, produksi, dan akses yang adil ke diagnosis, terapeutik, dan vaksin Covid-19, khususnya melalui COVAX.

Selain upaya global, Indonesia sebagai Ketua Senior Officials' Meeting on Health Development (SOMHD) juga terus memimpin berbagai upaya

regional di sektor kesehatan melalui sejumlah inisiatif yang diangkat di rangkaian KTT ASEAN ke-37 dan pertemuan tingkat tinggi terkait lainnya, sekaligus menindaklanjuti KTT Khusus Covid-19 dan KTT ASEAN ke-36, salah satunya, pembentukan Kerangka Kerja Pemulihan Menyeluruh (ASEAN Comprehensive Recovery Framework/ACRF) dan rencana implementasinya, Dana Tanggap Covid-19 ASEAN (Covid-19 ASEAN Response Fund), Cadangan Perlengkapan Medis Regional ASEAN untuk Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Regional Reserve of Medical Supplies for Public Health Emergencies), dan inisiatif Indonesia untuk membangun kerangka Pengaturan Koridor Perjalanan ASEAN (ASEAN Declaration on an ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework).

ASEAN telah mengukuhkan diri sebagai *champion* kerangka multilateralisme dalam memajukan upaya penanganan pandemi dan membuktikan bahwa multilateralisme dapat bekerja lebih praktis dan *future-oriented*.

Dengan sejumlah upaya di sektor kesehatan ASEAN, multilateralisme yang direfleksikan oleh *ASEAN-led mechanism* bekerja dengan mesin yang dimotori oleh kepentingan masyarakat di kawasan. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dibangun dalam visi Masyarakat ASEAN selama ini, yaitu berpusat pada rakyat (*people-centred*).

### PEMULIHAN KOMPREHENSIF DI KAWASAN

Pada KTT ASEAN ke-37, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan penting bagi kawasan untuk bergerak di tengah pandemi, yakni, mendorong optimisme pemulihan ekonomi di kawasan dan menjaga keseimbangan di kawasan dengan mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan, penghormatan terhadap Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) dan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

Selain upaya nasional dalam menangani Covid-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi Covid-19

juga dilakukan secara signifikan dan menyeluruh. Pada permulaan pandemi, pasar keuangan langsung merosot, sedangkan sektor produksi, perdagangan, dan distribusi mulai terganggu oleh pembatasan perjalanan dan pergerakan. Kemudian, di sisi permintaan juga terguncang. Hal ini mendorong pemimpin ASEAN untuk menetapkan kesiapsiagaan sedini mungkin menghadapi situasi yang tidak menentu di kawasan dan global.

Jika dibandingkan dengan saat Asian Financial Crisis (AFC) 1997, output di ASEAN pulih dengan cepat meskipun pemulihan membutuhkan waktu lebih lama sebelum mencapai level berakhirnya krisis 1997. Melihat krisis saat ini, *a crisis like no other*, mendorong pemimpin ASEAN untuk menetapkan berbagai *targeted measures* di negara masing-masing karena pemulihan ekonomi di tengah krisis sulit diprediksi dengan pasti. Pemulihan sangat bergantung pada bagaimana negara mengendalikan pandemi dan tetap menerapkan tanggap darurat kesehatan masyarakat.

Di kawasan, respons pertama terhadap pandemi adalah kebijakan moneter, untuk memastikan likuiditas yang memadai di perekonomian ketika kekhawatiran awal pada rantai pasokan yang terganggu dan gangguan perjalanan muncul. Namun, karena skala pandemi meluas dan begitu pula dampak pandemi menjadi lebih besar, pemerintah menerapkan berbagai stimulus fiskal yang lebih kuat dan meningkatkan kapasitas sektor kesehatan demi meredam dampak pada ekonomi yang lebih luas, terutama pada perekonomian yang sulit, sektor yang terkena dampak seperti pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Oleh sebab itu, disepakatinya ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) menjadi *exit strategy* yang menyeluruh dan terkoordinasi bagi ASEAN keluar dari keterpurukan akibat pandemi. Kerangka pemulihan ini bertujuan untuk mengartikulasikan



Sumber: ASEAN.org

# PEMUDA DALAM KRISIS COVID-19

Nanda Tri Andari Harahap  
Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN



Sumber: ASEAN.org

tanggapan ASEAN melalui berbagai tahap pemulihan, dengan berfokus pada sektor-sektor utama yang paling terpengaruh oleh pandemi dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk pemulihan sejalan dengan prioritas sektoral dan regional. Ini juga berfungsi sebagai referensi bagi berbagai badan sektoral di seluruh pilar dan pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan berkontribusi pada upaya pemulihan kawasan secara keseluruhan, dengan tujuan akhir membangun pemulihan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan sejalan dengan Visi Komunitas ASEAN 2025.

Di dalam ASEAN Comprehensive Recovery Framework, pengaturan koridor perjalanan juga diangkat sejalan dengan deklarasi kesepakatan para pemimpin ASEAN. Selanjutnya, deklarasi ini perlu diwujudkan untuk menjaga perjalanan esensial serta keterhubungan bisnis dan perdagangan di kawasan. Selain itu, kehadiran RCEP yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-4 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 15 November 2020 juga melengkapi apa yang telah dirumuskan di dalam kerangka pemulihan regional yang

menerapkan pendekatan *whole-of-ASEAN-community approach* ini.

Melalui kerangka kerja ASEAN Comprehensive Recovery Framework dan rencana implementasinya, KTT ASEAN ke-37 dan pertemuan tingkat tinggi lainnya, sekali lagi, telah mewujudkan kemampuan direktif dan kolektif ASEAN dalam menggerakkan regionalisme ke arah multilateralisme yang praktis dan konkret. Pencapaian ini merupakan hasil dari langkah solid ASEAN untuk segera secara bertahap keluar dari badai pandemi.



Sumber: Asean.org

## Pandemi Covid-19 yang muncul pertama kali di akhir 2019 telah mengguncang kestabilan dunia.

Tidak sedikit pihak yang menganggap pandemi ini sebagai krisis, baik itu krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis keamanan, dan sebagainya. Menurut Uriel Rosenthal, Arjen Boin, dan Louise K. Comfort pada bukunya *Managing Crises: Threats, Dilemmas, Opportunities* yang terbit pada 2001, krisis terjadi ketika sekelompok orang – organisasi, kota, atau negara – merasakan ancaman terhadap nilai – nilai utamanya (*core value*) atau yang mengganggu fungsi kehidupannya, dan harus diselesaikan di bawah kondisi yang tidak pasti.

Jika merujuk pada pengertian tersebut, Covid-19 merupakan ancaman yang telah mengganggu kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari pekerjaan, sekolah, kuliah, aktivitas sosial hingga keagamaan. Ancaman Covid-19 telah mengganggu fungsi kehidupan manusia.

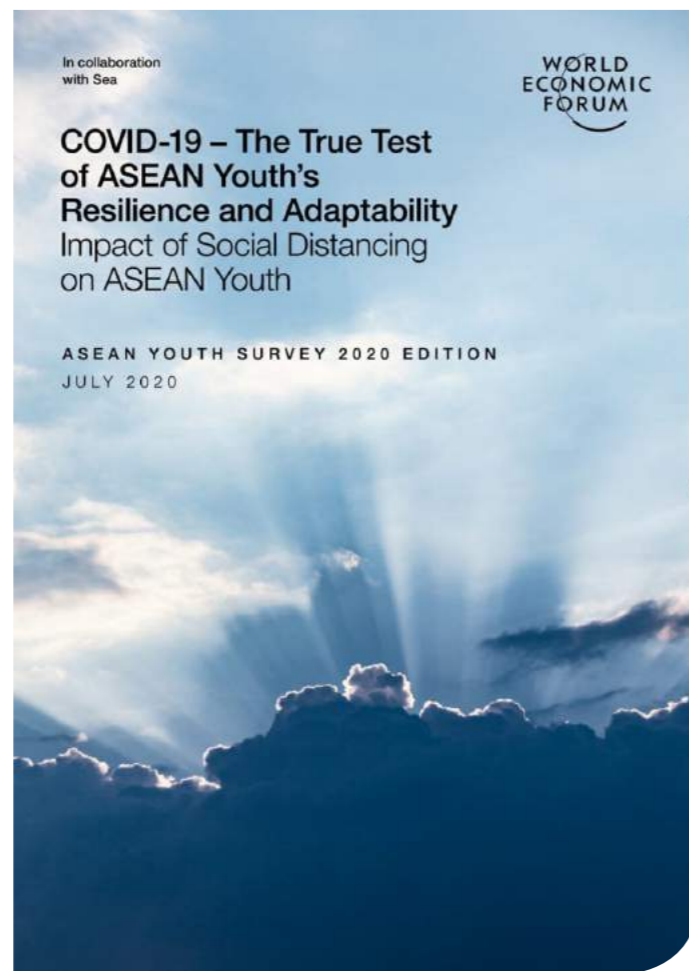
Namun, terdapat premis yang menarik dari pernyataan Rosenthal dan kawan-kawan di atas. Rosenthal menyatakan ancaman tersebut harus diselesaikan di bawah kondisi yang tidak pasti. Sehingga implikasinya, terdapat kewajiban yang harus ditunaikan untuk menyelesaikan



First ASEAN Youth Development Index



Sumber: ASEAN.org



Sumber: Weforum.org

situasi krisis dan keluar dari ancaman tersebut.

**PENANGANAN KRISIS COVID-19**

Sejak pertama kali menyebar pada awal 2020, pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis di kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 memaksa manusia beradaptasi dengan situasi baru dalam kehidupan sehari-harinya.

Menanggapi situasi baru ini, pemerintah negara-negara di seluruh dunia mengambil sederet langkah untuk menghambat penyebaran Covid-19, mulai dari penutupan batas – batas negara, pembatasan atau menutup sepenuhnya aktivitas masyarakat, hingga peningkatan kebutuhan medis seperti obat-obatan dan peralatan kesehatan.

Maret 2020, IMF menyatakan krisis Covid-19 berimplikasi pada krisis

ekonomi. Pada Juni 2020, IMF memproyeksikan terjadi kontraksi sebesar 4,9% dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Global. Menyusul laporan tersebut, pada Oktober 2020, IMF menyebutkan ekonomi global pada akhirnya berkinerja lebih baik daripada prediksi IMF pada kuartal kedua dan ketiga, namun pemulihan ekonomi selepas pandemi ini masih merupakan "jalan yang panjang".

Sebagai responsnya, beberapa negara telah membuka kembali aktivitas perekonomian dan membahas kesepakatan pembukaan perbatasan negara untuk membuka kembali pariwisata. Indonesia, misalnya, telah mencapai kesepakatan membuka perbatasan dengan Singapura, dan rencana pembukaan batas ASEAN dengan kesepakatan ASEAN Travel Corridor Arrangement. Harapannya, secara bertahap, negara-negara akan keluar dari ancaman krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Upaya di sektor kesehatan juga dilakukan, seperti manajemen rumah sakit menangani pasien Covid-19 dan non-Covid-19, pengadaan test kit, masker wajah, Alat Pelindung Diri (APD), hingga kerja sama pengadaan dan pengembangan vaksin.

E.L. Quarantelli, Patrick Lagadec, dan Arjen Boin dalam *A Heuristic Approach to Future Disasters and Crises: New, Old, and In-Between Types* (2007) menyebutkan, dalam menangani krisis dan bencana, pendekatan heuristik telah dilakukan oleh peradaban manusia, yang digambarkan dengan beberapa contoh, seperti letusan gunung St. Helens pada 18 Mei 1980, bom atom Hiroshima, hingga sindrom pernapasan akut parah (SARS) pada 2004.

Argumen yang disampaikan oleh Quarantelli dan kawan – kawan kembali terbukti saat pandemi Covid-19, di mana upaya demi upaya dilakukan

oleh pemerintah untuk menekan angka kerugian dan kehilangan akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya melalui pemerintah, masyarakat, seperti pemuda, juga dapat berupaya menangani krisis kesehatan ini.

**PEMUDA DAN PELUANG**

Arjen Boin dan Paul ‘t Hart dalam tulisan mereka tentang “The Crisis Approach” dalam buku *Handbook of Disaster Research* (2006) menyebutkan, merujuk istilah China dan Yunani, krisis menyiratkan 2 (dua) makna: ancaman (*threat*) dan peluang (*opportunity*).

Beranjak dari pengertian tersebut, krisis Covid-19 secara alamiah merupakan ancaman sekaligus kesempatan bagi kehidupan manusia. Pendekatan heuristik memberikan ruang bagi manusia untuk dapat memanfaatkan ide dan kreativitas penanganan krisis, termasuk di antaranya untuk mengeksplorasi peran pemuda dalam penanganannya.

Secara khusus di ASEAN, dikutip dari dokumen First ASEAN Youth Development Index, jumlah pemuda ASEAN pada 2016 sebanyak 213 juta orang dan diprediksi akan terus tumbuh mencapai puncaknya pada 2038 dengan jumlah lebih dari 220 juta orang. Ini berarti, 1 dari 3 orang di ASEAN adalah pemuda.

Dalam situasi pandemi saat ini, kurang lebih 213 juta pemuda merupakan ancaman sekaligus peluang di ASEAN. Menggunakan pendekatan heuristik, para pemuda ASEAN dapat diarahkan menjadi peluang bagi penanganan Covid-19 di kawasan. Selain karena jumlahnya yang besar, para pemuda di ASEAN dapat menjadi sumber peluang strategis untuk membantu ASEAN menangani Covid-19.

Sebagai contoh, Indonesia melalui para pemudanya telah beberapa kali mengadakan kegiatan volunteerisme untuk membantu para pekerja yang

terdampak Covid-19, salah satunya dengan berbagi bantuan sosial. Para pemuda juga kerap membantu pemerintah dalam mengampanyekan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tagar #DiRumahAja yang digaungkan para pemuda di sosial media juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap di rumah dan membatasi kegiatan di luar rumah yang tidak mendesak.

Selain membantu penanganan Covid-19, para pemuda juga mendapatkan peluang untuk perkembangan diri sendiri. Mengutip laporan dari World Economic Forum di 2020 ASEAN Youth Survey on Covid-19 – The True Test of ASEAN Youth’s Resilience and Adaptability, akibat dari pandemi Covid-19, para pemuda ASEAN telah menjadi lebih memahami dunia digital dan teknologi, mempelajari keahlian – keahlian baru, berpikir lebih kritis dan kreatif, serta



Sumber: ASEAN.org



Sumber: ASEAN.org

mampu mengembangkan kemampuan mendirikan bisnis dengan konsep baru.

Berdasarkan laporan dimaksud, 48% pemuda yang mengikuti survei mengaku telah lebih siap dan tangguh untuk menghadapi pandemi lagi di masa depan. Para responden juga menyampaikan kecenderungan perubahan pola hidup mereka pasca-

pandemi dengan lebih berorientasi pada teknologi. Hal ini berujung pada berkurangnya kesenjangan transformasi digital, meningkatnya bisnis digital dan *youth entrepreneurship* dan menurunnya kesenjangan ekonomi.

Laporan tersebut sejalan dengan apa yang para pemuda sampaikan dalam

Tingginya jumlah pemuda di ASEAN, dan semangat kesatuan dan ketangguhan yang tidak kalah tinggi, merupakan modal utama para pemuda memanfaatkan momentum ini untuk menjadi lebih tangguh di masa depan. Pada akhirnya, ketika semua ini berlalu, ASEAN akan memiliki para pemuda yang siap membawa ASEAN memenuhi cita-citanya.

ASEAN Youth Statement 2020 yang disampaikan di hadapan para pemimpin ASEAN dalam rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-37. Pada saat itu, para pemuda menyampaikan keinginannya atas 3 (tiga) hal, yakni Youth Volunteerism, Youth Entrepreneurship, dan 4th Industrial Revolution Skills for Youth. Dalam kesempatan tersebut, para pemuda ASEAN menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat memfasilitasi tumbuh kembang para pemuda melalui 3 (tiga) hal tersebut.

Covid-19 telah menjangkiti puluhan juta orang dan menewaskan lebih dari 1 juta orang. Dunia dihadapkan pada pilihan untuk hidup dan bertahan, atau terenggut oleh ganasnya virus SARS-CoV-2. Namun di sisi lain, krisis ini juga menciptakan peluang.

# MENANGKAP PELUANG IMPLEMENTASI RCEP BAGI INDONESIA

Ahmad Fahriza dan Ivan Namanto  
Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN

Setelah hampir satu dekade melewati proses perundingan yang begitu alot, akhirnya perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership*, atau yang biasa disingkat RCEP, resmi ditandatangani oleh 15 Negara pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-4 November 2020 yang merupakan salah satu rangkaian dari KTT ASEAN ke-37 dibawah keketuaan Vietnam tahun 2020.



Sumber: Shutterstock

Kesepakatan tersebut berhasil menarik perhatian dunia mengingat RCEP, yang mencakup 10 Negara ASEAN beserta 5 mitra wicaranya (Australia, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Selandia Baru) tersebut, menjadi blok kerja sama ekonomi terbesar di muka bumi saat ini. Sebagai gambaran, besaran perekonomian partisipan RCEP mendekati sepertiga populasi dan perekonomian dunia, serta mencakup 27 persen perdagangan dunia dan 29 persen investasi langsung luar negeri (*Foreign Direct Investment*) dunia. Pencapaian tersebut patut menjadi kebanggaan bagi NKRI. Dibawah keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011, inisiatif RCEP muncul untuk

mendorong kerja sama ekonomi yang lebih komprehensif antara ASEAN dengan mitra wicara. Kondisi geopolitik dan geoekonomi di kawasan khususnya persaingan dua raksasa besar Asia yaitu RRT dan Jepang, memberikan tempat bagi ASEAN untuk mengambil alih nahkoda pengembangan kerja sama ekonomi di Kawasan. Bahkan, Indonesia terlibat secara aktif menjadi Ketua Komite Negosiasi Perdagangan (Trade Negotiating Committee) dalam perundingan RCEP.

Perjanjian RCEP memiliki tujuan untuk membangun kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan yang akan memfasilitasi perluasan perdagangan dan investasi regional



Sumber: ASEAN.org



serta berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global. Perjanjian tersebut mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari perdagangan barang dan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, *e-commerce*, persaingan usaha, kekayaan intelektual, hingga Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

ASEAN sendiri sebenarnya telah memiliki beberapa kerja sama ekonomi dengan mitra wicaranya melalui skema umum Free Trade Agreement (FTA) Plus One. Skema tersebut melibatkan masing-masing negara mitra dalam perjanjian berbeda. Ditambah lagi, beberapa anggota negara ASEAN juga melakukan kesepakatan secara bilateral dengan mitranya masing-masing. Banyaknya perjanjian tersebut justru menimbulkan tumpang tindih aturan yang dikenal dengan efek semangkuk mi (*noodle bowl effect*) dimana alur kerja sama yang digunakan menjadi kusut akibat semakin kompleksnya perjanjian kerja sama yang dihadapi oleh dunia usaha. Kehadiran RCEP dinilai dapat menjadi jawaban.

**ARAH KERJA SAMA STRATEGIS KEBERADAAN RCEP**

Ditengah dinamika perdagangan dunia yang diwarnai dengan perang dagang, peningkatan proteksionisme dan disrupsi akibat bencana alam, proses diversifikasi lokasi produksi, baik dalam skala regional maupun global, menjadi salah satu tren dalam perdagangan internasional. Perusahaan-perusahaan berbasis multinasional semakin lazim menyebar lokasi produksinya di beberapa negara menyesuaikan spesialisasi masing-masing negara untuk mencapai efisiensi produksi. Sebagai contoh, dalam memproduksi sebuah mobil, komponen-komponen penyusun seperti mesin, ban, kaca hingga rangka mobil berasal dari banyak negara sesuai kemampuan industrinya.

Kebudayaan perjanjian kerja sama yang telah ada sebelumnya, dinilai masih belum optimal mendorong keterlibatan industri di Kawasan dalam *global value chain*. Sebagai ilustrasi, ekspor produk yang dihasilkan oleh negara ASEAN masih memungkinkan

tidak dikenakan tarif masuk oleh negara mitra FTA dikarenakan produk tersebut mengandung komponen dari negara mitra lainnya yang tidak dalam cakupan kerja sama FTA tersebut. RCEP diharapkan dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan hambatan tersebut melalui kesepakatan aturan "*rules of origin*" diantara negara partisipan. Keberadaan RCEP dengan seluruh potensi ekonomi anggotanya dapat membentuk kawasan produksi yang terintegrasi sekaligus pasar yang menyerap kerja sama produksi tersebut. Pelaku usaha berbasis rantai pasok global, dapat memperluas akses terhadap sumber pasokan industri maupun pemasaran produk. Dengan begitu, perdagangan bahan baku produksi antar industri dalam kawasan akan semakin tinggi dan membentuk rantai pasokan regional yang kuat.

Kelengkapan area pengaturan kerja sama diantaranya terkait UKM, *e-commerce*, kekayaan intelektual, kerja sama teknis juga menunjukkan RCEP mengikuti kebutuhan perkembangan area kerja sama yang kekinian. Hal

tersebut juga dapat memberikan kepastian aturan dalam pengembangan kerja sama bidang tersebut di Kawasan.

**PELUANG INDONESIA MELALUI RCEP**

Kepentingan Indonesia untuk bergabung dalam RCEP sering kali masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Padahal, Ketidakikutsertaan Indonesia justru membuat peluang Indonesia dari RCEP seperti investasi maupun akses pasar dapat diambil alih oleh tetangga Indonesia di ASEAN seperti Vietnam dan Thailand.

Partisipan RCEP merupakan mitra yang cukup strategis bagi Indonesia. Tercatat pada tahun 2019, 14 negara tersebut menjadi pasar bagi 57 persen ekspor serta 67 persen sumber impor Indonesia. Bahkan, dari total 28,2 miliar USD investasi langsung luar negeri ke Indonesia, 66 persen diantaranya berasal dari mitranya di RCEP.

Dengan adanya RCEP, hubungan strategis antara Indonesia dengan para partisipan RCEP dapat terus didorong untuk mendapatkan manfaat

yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Beberapa peluang yang dapat dimaksimalkan Indonesia melalui antara lain:

Pertama, RCEP memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan partisipasi industrinya dalam rantai nilai regional maupun global. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dalam negeri dalam ekspor Indonesia khususnya pada industri manufaktur yang dapat menyerap tenaga kerja cukup besar. Terkait hal tersebut, Indonesia juga perlu menyiapkan UKMnya untuk dapat ikut serta dalam rantai nilai regional.

Kedua, sebagai bagian dari blok kerja sama ekonomi terbesar di dunia, Indonesia dapat memanfaatkan peluang fenomena diversifikasi lokasi perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk menarik investasi asing masuk lebih besar. Potensi terbentuknya rantai pasokan regional menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik perusahaan multinasional untuk mendirikan bagian dari kegiatan produksinya di Indonesia.

Mendukung hal tersebut, Indonesia telah menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diharapkan dapat mempermudah birokrasi investasi masuk ke Indonesia.

Ketiga, RCEP dapat menjadi dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing Industri nasional. Melalui investasi langsung luar negeri yang masuk, diharapkan adanya transfer teknologi yang dapat mendorong peningkatan produktifitas industri. Kerja sama ekonomi dan teknis dalam kerangka RCEP, memberikan kesempatan bagi negara berkembang mendapat bantuan peningkatan kapasitas dari negara maju. Peningkatan kapasitas SDM Indonesia juga menjadi tugas penting untuk menyokong pengembangan industri nasional.

Implementasi RCEP akan resmi dimulai setelah 6 Negara Anggota ASEAN dan 3 Mitra Wicara telah meratifikasi perjanjian tersebut. Jelangberlakunya RCEP, Indonesia perlu untuk mempersiapkan diri untuk benar-benar dapat memetik buah manfaat dari keberadaan kerja sama tersebut.



Sumber: Shutterstock



## Yuyun Wahyuningrum, HAK ASASI MANUSIA

# DAN ASEAN

Annisa Amrih Sophiany, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

**Majalah Masyarakat ASEAN edisi ke-26 dengan tema "Investing on Women and Youth", meng-highlight kaum perempuan dan pemuda sebagai kontributor penting dalam membangun sebuah bangsa dan negara.**

Pada kesempatan kali ini Tim Majalah Masyarakat ASEAN (MMA) mewawancarai Yuyun Wahyuningrum, wakil Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) periode 2019-2021. Yuyun mengantongi 22 tahun pengalaman berkecimpung pada isu HAM dan kerap melakukan advokasi bagi korban pelanggaran HAM. Tim MMA akan mengulas tentang sepak terjang Yuyun Wahyuningrum melalui AICHR sebagai corong diplomasi Indonesia dalam upaya penegakan HAM di Kawasan ASEAN.

Keterbatasan gerak di masa pandemi Covid-19, tak membuat Yuyun

Wahyuningrum hanya berdiam menyerah pada keadaan. Ia tetap sibuk berkoordinasi dan rapat-rapat virtual dengan Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, para akademisi, dan masyarakat sipil.

Selain rapat-rapat, Yuyun juga mengajar, sebagai pengajar tamu di berbagai universitas di Indonesia dan Asia Tenggara, diantaranya Universitas Jember, Universitas Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Nahdhatul Ulama, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Negeri



Sumber: Dok. Pribadi / Yuyun Wahyuningrum

Menjadi wakil Indonesia pada the 30th Meeting of AICHR, Hanoi, 17-21 Februari 2020.

Medan, Universitas Islam Bandung, Universitas Presiden, Universitas Katolik Parahiyangan, Universitas Padjajaran, dan Bangkok University. Temanya beragam, dari hak asasi manusia di Asia Tenggara, AICHR dan peran Indonesia di ASEAN. Tentu ia tak perlu keliling. Perkuliahan dilakukan dengan sistem daring. "Saya ingin menjangkau banyak mahasiswa, peneliti, dan dosen di kawasan Asia Tenggara untuk mendorong lebih banyak esai, skripsi, atau tulisan-tulisan akademik mengenai HAM di ASEAN dan peran Indonesia di AICHR," ujarnya saat bertatap muka secara daring dengan tim MMA pada 24 November 2020, di Jakarta.

Namun kesibukan Yuyun tidak hanya itu. Ia juga cukup padat dengan aktivitas di media sosial. Tentu bukan untuk sekadar menorehkan status kegiatan hariannya. Ia menorehkan konten-konten informatif, kreatif dan interaktif mengenai perkembangan hak asasi manusia di AICHR. Ia percaya bahwa meningkatkan keterpantauannya lembaga perlindungan HAM di wilayah publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada peran institusi-institusi pemerintah, utamanya pada isu HAM.

Yuyun tak mengeluh. Dia dengan gembira melakukan semuanya. Berdasarkan pengalamannya selama dua dekade di bidang hak asasi manusia membuatnya sadar bahwa pekerjaannya masih jauh dari selesai. Apalagi di lingkup yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara. Masih banyak korban-korban pelecehan hak asasi manusia, termasuk perempuan dan anak, yang mendapat perhatian lebih darinya. Ia pun berharap, studi doktoral yang tengah diambarnya mengenai hak asasi manusia dan regionalism di ASEAN di International Institute of Social Studies Erasmus University di Rotterdam, Belanda, akan membantunya dalam bergerak. Semuanya diceritakan Yuyun dengan begitu berapi-api berbicara tentang hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun ASEAN. Keterlibatan pemuda dalam pengambilan keputusan, juga tentang upaya-upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak.

### BERMULA DARI AYAH DAN GURU MENGAJI

Yuyun adalah sosok perempuan Jawa yang lugas dan berempati tinggi terhadap para korban pelecehan HAM, khususnya kaum perempuan dan anak. Ia mengawali karir bekerja di sektor

swasta, dalam perjalanannya Yuyun memilih fokus dan aktif dalam advokasi HAM.

Lahir di Jakarta, Yuyun tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan tentara dan guru. Hal itu membuatnya akrab dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sedari kecil ayahnya sudah menanamkan nilai-nilai padanya agar ia menjadi perempuan yang mandiri, memiliki karir dan tetap mengutamakan makna keluarga. Ia pun dididik menjadi sosok yang tangguh dan kritis.

Kepedulian terhadap kaum yang termarginalkan juga tumbuh. Lebih berkembang lagi saat ia mengenyam pendidikan di luar keluarga. "Menurut Guru mengaji saya, siapa yang paling baik diantara kita itu bukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Bukan yang kaya atau miskin, tetapi siapa yang paling bermanfaat bagi orang banyak", kata Yuyun sambil mengenang masa kecilnya. Namun langkah formalnya di lembaga yang mengurus hak asasi manusia baru dimulai saat ia bekerja sama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Pengalaman sebelumnya bekerja di sebuah lembaga non-pemerintah telah memberikannya cara pandang baru terhadap Indonesia. Sehingga ia lebih bisa memandang isu hak asasi manusia dari berbagai perspektif melalui pemikiran yang lebih kritis dan membangun.

Dalam perjalanannya, Yuyun memperjuangkan penegakan hak asasi manusia melalui berbagai cara, di antaranya lewat tulisan-tulisan di media massa, penyuluhan kesadaran hak-hak perempuan dan anak ke daerah-daerah, dan berbicara kepada para korban. Namun di sisi lain, ia juga masih terus belajar. "It's serving my intellectual interest, sehingga saya merasa menjadi manusia yang seutuhnya dengan adanya keinginan terus belajar dan mendalami bidang HAM," ujarnya.

Kecintaan Yuyun terhadap bidang HAM adalah karena isu-isu HAM yang sangat dinamis dan terus berkembang. Tak heran, ia juga begitu menikmati

tugas-tugasnya sebagai peneliti di lapangan. Menurutnya, dengan turun ke lapangan, ia menjadi sering bertemu dengan warga masyarakat biasa, terutama anak-anak dan perempuan yang menjadi korban pelanggaran HAM. Di lapangan, ia juga dituntut untuk dapat menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait hak asasi manusia dengan bahasa yang mudah dipahami, baik oleh para korban maupun masyarakat umum. Dilain sisi, Yuyun juga sering berhadapan dengan pejabat dan institusi pemerintah sehingga ia perlu untuk dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi, keterampilan menginterpretasi, dan membentuk sikap yang bersahaja.

Dengan posisinya sekarang sebagai wakil Indonesia di AICHR, membuat Yuyun memiliki perspektif yang lebih komprehensif terhadap upaya penegakan hak asasi manusia di kawasan ASEAN.

### TANTANGAN PENEGAKAN HAM DI ASEAN

Meski telah duduk di AICHR, Yuyun masih sulit mengukur implementasi penegakan hak asasi manusia di

negara-negara anggota ASEAN. "Agak sulit melihat situasi HAM di negara-negara ASEAN karena berubah terus bergantung pada rezim dan naik turun capaiannya. Hampir tidak ada yang stabil kecuali Indonesia," ucap Yuyun.

Mengomentari kondisi HAM di Indonesia di bandingkan negara-negara ASEAN lainnya, menurut Yuyun tidak ada negara anggota ASEAN yang selalu menjadi *champion* dalam penegakan HAM. "Pada dasarnya hubungan negara dengan hukum HAM internasional memang agak *complicated*. Negara selalu dilihat dalam dua kaca mata, yaitu sebagai pelanggar HAM dan pelindung HAM sekaligus. Jadi kalau cara melihatnya dari adanya pelanggaran saja tanpa melihat upaya-upaya penegakan yang dilakukan negara, *assessment*-nya jadi tidak imbang dan tidak lengkap. Harus dilihat upaya-upaya negara dalam ranah perlindungan HAM-nya juga", ia menambahkan.

Khusus Indonesia, Yuyun berpendapat bahwa kondisi HAM sering dipandang memburuk dari waktu ke waktu. Namun demikian, Indonesia memiliki mekanisme nasional HAM yang independen dan menjalankan

tugasnya dengan sangat baik, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, LPSK, Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kemkumham dan masyarakat sipil yang kuat serta ruang berpendapat yang terbuka.

Menurut Yuyun, dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia lah yang memiliki mekanisme dan lembaga yang mengupayakan penegakan hak asasi manusia paling lengkap. Sayangnya, mereka tidak mendapat perhatian dan pengakuan yang memadai atas prestasi-prestasinya.

"Saya mengamati dan mengapresiasi upaya yang luar biasa dari mekanisme-mekanisme HAM di Indonesia, dan kerja-kerja mereka juga didukung oleh orang-orang yang *well educated, dedicated*, dan tidak mengenal lelah. Mereka berhak mendapatkan apresiasi walaupun mereka juga bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati. Mungkin perlu ada strategi komunikasi yang baik agar apa yang mereka lakukan diketahui dan apresiasi oleh warga secara nasional, tidak hanya mereka yang tinggal di Jakarta, juga oleh komunitas regional dan internasional. Indonesia ini kaya akan *good practices* dalam pemenuhan dan perlindungan HAM, lho!", Yuyun menambahkan.

Gambaran Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam upaya penegakan HAM di mata dunia Internasional, tampak masih samar. Padahal, upaya Indonesia dan ASEAN dalam penegakan HAM cukup nyata. Terdapat berbagai capaian dari mekanisme penegakan HAM di Indonesia yang telah berjalan sebagaimana tujuan pembentukannya. Namun, belum menjadi bagian dari gambaran Indonesia sebagai negara yang berusaha keras untuk menjamin perlindungan bagi warga negaranya. Oleh karena itu, menurut Yuyun, Pemri perlu mengubah narasi tentang HAM di Indonesia dengan lebih mengedepankan upaya-upaya dan prestasi-prestasi yang telah dicapai dalam pemajuan HAM. Upaya ini perlu dilakukan secara terencana, sistematis, dan terukur.

Sumber: Dok. Pribadi / Yuyun Wahyuningrum



Pemerintah harus berani menampilkan citra diri sebagai negara yang konsisten menghormati HAM, baik di publik nasional maupun di publik regional dan internasional. Salah satu caranya, menurut Yuyun adalah dengan selalu menggunakan pendekatan dan bahasa-bahasa yang lekat dengan HAM apabila sedang menyampaikan pernyataan-pernyataan publik.

"Misalnya saya pernah mendengar seorang pegawai pemerintah menyatakan bahwa walaupun Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi 1951 mengenai pengungsi, tetapi Indonesia mengupayakan agar anak-anak pengungsi bisa sekolah. Hal tersebut merupakan cerminan komitmen Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak PBB. Nah, ucapan semacam ini adalah pernyataan yang simpatik, humanis dan berpihak pada HAM, utamanya hak anak. Pernyataan publik semacam ini juga merefleksikan keseriusan dan komitmen pemri yang kuat dalam melaksanakan hak anak", jelas Yuyun. "Walaupun akan lebih baik lagi kalau Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 mengenai pengungsi. Biar jangan setengah-setengah kalau mau *kasih* teladan yang baik di kawasan tentang penanganan pengungsi", tambah Yuyun.

Tidak hanya narasi HAM di nasional yang diusulkan berubah, tetapi juga di kawasan ASEAN. Menurut Yuyun, saat ini, ketika ada pembahasan HAM di

ASEAN pada forum-forum internasional, kawasan ASEAN selalu ditempatkan sebagai kawasan yang negaranya tidak memiliki kemampuan melindungi HAM. "Ada semacam generalisasi, bahwa pelanggaran HAM memang terjadi di beberapa negara-negara anggota ASEAN, tetapi sungguh tidak *fair* apabila cap 'negara buruk dalam HAM' atau 'negara gagal' langsung dibubuhkan ke negara-negara di kawasan ini, karena itu terlalu menyederhanakan masalah" tandas Yuyun. Seyogyanya narasi tentang HAM di Indonesia dan di kawasan penting untuk dikedepankan guna membentuk perspektif masyarakat global yang berimbang dan lebih adil pada situasi HAM di ASEAN, agar lebih *fair* dan tidak diskriminatif.

### PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMUDA ASEAN

Dalam upaya memajukan penghargaan atas hak asasi manusia di kawasan, ASEAN sangat memerlukan partisipasi masyarakat sipil, terutama perempuan dan pemuda. "Saya sangat menghargai banyaknya inisiatif, terutama pada pilar *social cultural*, yang melibatkan pemuda. *They are the leaders now*. Merekalah pemimpin saat ini bukan lagi *youth is our future*," ujar Yuyun.

Ia juga menjelaskan bahwa berbagai institusi di lingkup ASEAN telah mengusung beragam program guna meningkatkan peran anak muda di kawasan, di antaranya: ASEAN Sekretariat, AICHR dan ASEAN Foundation. Salah satu kegiatannya adalah mengundang ASEAN Youth Forum untuk memberikan masukan bagi pembentukan kebijakan ASEAN. Menurut Yuyun, program-program tersebut diadakan agar pemuda mempunyai rasa memiliki dan mau terlibat dengan upaya-upaya pemerintah negara ASEAN.

Dalam pengambilan keputusan, pemerintah perlu mendapatkan masukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan para pemuda. ASEAN Youth Index merupakan produk dari masukan-masukan oleh ASEAN Youth Forum.

Sejalan dengan upaya tersebut, AICHR secara reguler mengadakan ASEAN Youth Debate untuk meningkatkan pemahaman anak muda mengenai ASEAN dan peran AICHR serta isu-isu hak asasi di Kawasan. Yuyun memberikan contoh tentang salah satu gagasan cemerlang dari keterlibatan pemuda Indonesia, yaitu *Gerakan Indonesia Diet Sampak Plastik* yang dilakukan oleh Rahyang Nusantara dari Bogor, Jawa Barat. Rahyang mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan diet sampah plastik guna menjawab persoalan sampah plastik di Indonesia. Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda ASEAN lainnya.

Sementara untuk perempuan dan anak, ASEAN membangun The ASEAN Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children (ACWC). Di Indonesia yang menangani ini adalah Kementerian Perempuan dan Anak. Beberapa program ACWC antara lain: *gender mainstreaming* dan *gender equality* (untuk keterwakilan perempuan di politik).

Menurut Yuyun Indonesia sudah mendapatkan konsensus AICHR untuk melaksanakan dialog dengan sektor terkait di ASEAN dan tiga pilarnya untuk Bersama membahas mengenai komitmen pelaksanaan hak asasi perempuan dan anak pada tahun depan. Dialog ini diadakan tahun 2020 tetapi tertunda karena pandemi Covid-19. Dialog ini diadakan untuk mengecek bagaimana *sectoral bodies* negara ASEAN mengimplementasikan hak perempuan dan anak di wilayah mandatnya.

Selain itu, SOM SWD setiap tahun juga mengadakan program peningkatan kapasitas yang fokus pada isu perempuan dan anak, khususnya orang dengan disabilitas, yaitu penerapan hak untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus.

Perempuan di panggung politik juga menjadi perhatian. Menurut Yuyun, saat ini Indonesialah yang paling mendorong



Mewakili AICHR Indonesia di forum ASEAN-EU Policy Dialogue on Human Rights, bulan Oktober 2019 di Brussel, Belgia. Yuyun menjelaskan bagaimana negara-negara di ASEAN dan AICHR merespon isu-isu disinformasi, misinformasi, dan *fake news* dengan pendekatan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Sumber: Dok. Pribadi / Yuyun Wahyuningrum

hak perempuan untuk berpartisipasi di politik dan isu-isu perdamaian. Yuyun menilai, keterwakilan perempuan di ASEAN, khususnya dalam isu hak asasi manusia, masih terbilang minim. Hal itulah yang membuat dirinya bertekad untuk menekuni bidang hak asasi manusia di ASEAN.

Selain minat dan kepeduliannya terhadap penegakan hak asasi manusia di ASEAN, keberadaan Yuyun juga untuk keterwakilan suara perempuan di level pembuat kebijakan. Menurut Yuyun, posisinya sebagai wakil Indonesia di AICHR, membuat negara-negara ASEAN lainnya mulai melihat signifikansi wakil perempuan di dalam pembahasan isu hak asasi manusia pada pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ASEAN.

“Kehadiran dan pemikiran perempuan sangat penting di forum-forum regional dan internasional. Pemikiran perempuan yang seringkali berbasis pada kemampuan mereka menerjemahkan pengalaman dan menginternalisasi pengamatan di sekitarnya membuahakan kebijakan-kebijakan yang seringkali tepat sasaran dan sensitif terhadap situasi tertentu. Kehadiran perempuan secara fisik juga penting untuk mengurangi

komentar-komentar *sexist* yang biasanya diutarakan peserta pertemuan, baik secara sengaja atau tidak sengaja”, Yuyun menjelaskan.

### PERAN INDONESIA DALAM PEMAJUAN HAM DI ASEAN

Hampir dua tahun mewakili Indonesia di AICHR, menurut Yuyun, Indonesia telah menjalankan peran besar dalam upaya memajukan kondisi hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Melalui AICHR, Indonesia mengusung beragam isu hak asasi, di antaranya: pencegahan penyiksaan; kebebasan berekspresi dan berpendapat; kebebasan beragama dan berkeyakinan; perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak; perlindungan pekerja migran; hak atas kesehatan; hak atas pembangunan; pendekatan HAM untuk terorisme; kota ramah HAM; hak mendapatkan pemulihan yang efektif; dan pelibatan masyarakat sipil dalam upaya pemajuan hak asasi manusia.

Yuyun mengikuti betul bagaimana pemerintah Indonesia juga sangat aktif dalam mendorong adanya pengkajian ulang kerangka acuan (TOR) AICHR. Menurutnya, proses tersebut diharapkan dapat membuat AICHR

berevolusi menjadi mekanisme yang lebih kuat seperti yang dicita-citakan.

Saat ini, AICHR telah memasuki usia yang ke-11 tahun. Sejak awal terbentuknya AICHR, Indonesia berperan besar dalam proses pembentukan ToR khususnya dalam inisiatif, agenda, substansi, dan logistik (dokumen-dokumen).

“Saya ada di sana menyaksikan bagaimana Menteri Luar Negeri Thailand menjelaskan dalam konferensi pers mengenai telah diadopsinya Kerangka Acuan AICHR di ASEAN. Beliau menyatakan bahwa Kerangka Acuan AICHR telah mencapai konsensus maksimum dan setelah diadopsi, akan dibuat *Political Document* sebagai dokumen penyerta Kerangka Acuan AICHR. Saat itu, Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda berperan untuk mengikat komitmen-komitmen negara ASEAN dalam mendukung AICHR. Sebagai pemrakarsa terbentuknya AICHR, Pemri melihat adanya kebutuhan ASEAN untuk mendirikan lembaga independen yang dapat menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia di ASEAN. Indonesia menginginkan agar AICHR menjadi Lembaga yang memiliki mekanisme yang kuat, minimal harus



Sumber: Dok. Pribadi / Yuyun Wahyuningrum

Mewakili AICHR Indonesia di forum ASEAN-EU Policy Dialogue on Human Rights, bulan Oktober 2019 di Brussel, Belgia. Yuyun menjelaskan bagaimana negara-negara di ASEAN dan AICHR merespon isu-isu disinformasi, misinformasi, dan *fake news* dengan pendekatan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

setara dengan Komnas HAM untuk memperjuangkan perlindungan HAM di Kawasan ASEAN. AICHR harus kuat, kredibel dan independen,” ujar Yuyun mengenang pertemuan ASEAN Foreign Minister Meeting (AMM) ke-42 di Phuket, Thailand, 20 Juli 2009.

Memahami bahwa AICHR bergerak dengan cara berevolusi, maka Pemri telah mendorong program-program AICHR untuk lebih banyak kepada isu-isu yang memfasilitasi terbentuknya upaya perlindungan HAM, seperti pada pembuatan Rencana Kerja Lima Tahunan AICHR periode 2021-2025, Indonesia berhasil memasukan upaya-upaya perlindungan.

“Sejak awal, peran Indonesia sudah jelas di AICHR, yaitu mengambil peran memimpin dan itu sudah terefleksikan dalam pilihan-pilihan kegiatan, posisi-posisi Indonesia di AICHR, dan pada proses pemilihan wakil-wakilnya. Saat ini tantangannya adalah bagaimana bisa terus memimpin, memberi nilai tambah pada kepentingan Indonesia di AICHR dan juga bagaimana *raise the bar* dalam mempromosikan peran perlindungan HAM di AICHR,” ungkap Yuyun.

Sejalan dengan upaya penghormatan terhadap HAM Indonesia perlu mengubah narasi mengenai HAM di

ASEAN agar isu HAM bisa berkembang dan tidak melulu mengenai Asian Values dan ASEAN Way. Terdapat banyak perkembangan HAM yang telah diupayakan oleh Indonesia selama lebih dari sebelas tahun ini, bahkan sebelum AICHR terbentuk. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemri menunjukkan upaya yang serius dalam penegakan HAM di Kawasan ASEAN, khususnya melalui mekanisme AICHR.

Menurut Yuyun, pada tahun 2019, Indonesia berhasil mendapatkan konsensus mengenai pembuatan mekanisme komplain dengan melalui tiga langkah. Pertama adalah semua komplain mengenai HAM akan di catat dan diterima oleh sekretariat ASEAN. Artinya AICHR menyetujui untuk menerima kasus-kasus hak asasi, walaupun Kerangka Acuan AICHR belum di-*review* atau direvisi.

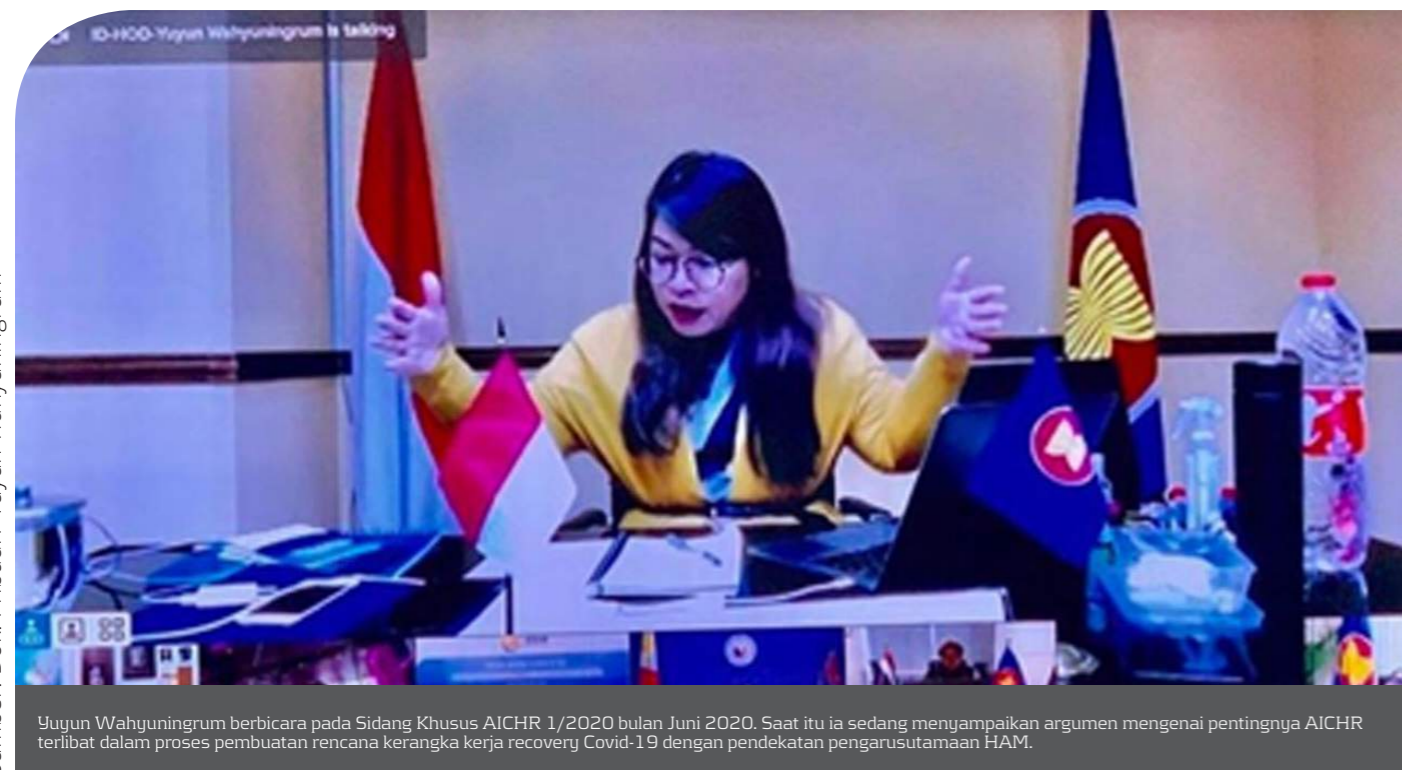
Langkah kedua adalah Sekretariat ASEAN akan membawanya ke sidang AICHR yang paling dekat tanggalnya. Dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu negara yang bersangkutan dapat menindaklanjutinya. Mekanisme ini memang belum sempurna, tetapi ini adalah sebuah *breakthrough* di AICHR.

Indonesia juga berhasil mendorong para wakil AICHR untuk menyepakati

AICHR Press Release on Covid-19 yang menekankan pentingnya pengarusutamaan HAM dalam respon dan penanganan pandemik. Inisiatif ini dilanjutkan dengan peran aktif Indonesia dalam memasukan elemen dan aktivitas yang bernuansa HAM dalam ASEAN Comprehensive Recovery Framework yang baru saja diadopsi pada KTT yang ke 37.

Di akhir perbincangan, Yuyun mengungkapkan harapannya, Indonesia tetap mengambil peran memimpin di AICHR dan menjadikan lembaga ini sebagai kendaraan untuk diplomasi hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, ia juga berharap AICHR tetap terbuka, mudah dijangkau, terlibat, dan selalu berani mengambil isu-isu dan pendekatan-pendekatan HAM yang dianggap sulit diterima di AICHR atau ASEAN. Menurut Yuyun, di Kawasan ASEAN, saat ini hanya Indonesia yang bisa diharapkan untuk terus berkomitmen pada nilai-nilai HAM dan Demokrasi.

“Indonesia adalah harapan para warga ASEAN bahwa Kawasan ini tetap akan berkembang dengan nilai-nilai yang dianggap baik seperti HAM, demokrasi, dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)” ungkap Yuyun menutup percakapan.



Yuyun Wahyuningrum berbicara pada Sidang Khusus AICHR 1/2020 bulan Juni 2020. Saat itu ia sedang menyampaikan argumen mengenai pentingnya AICHR terlibat dalam proses pembuatan rencana kerangka kerja recovery Covid-19 dengan pendekatan pengarusutamaan HAM.

# 53 TAHUN ASEAN: TANTANGAN UNTUK MENJAGA RELEVANSI

Audy Akbar Hasibuan, Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN



Sumber: PSA Undiknas

**Sejak terbentuk pada 8 Agustus 1967, ASEAN telah berkembang sangat pesat sebagai komunitas dan organisasi.**

Sejak terbentuk ASEAN telah mendorong lahirnya ASEAN Studies Centre (ASC) atau Pusat Studi ASEAN (PSA) yang berfokus pada studi mengenai ASEAN melalui sudut pandang akademik. Saat ini, Indonesia telah memiliki 68 PSA yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan antusiasme dan dukungan kalangan akademisi terhadap perkembangan ASEAN.

Untuk memperingati 53 tahun berdirinya ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan 13 PSA menggelar kegiatan "Talkshow PSA melalui Radio dalam Rangka Memperingati ASEAN Day ke-53" pada 3-14 Agustus 2020. PSA yang telah berpartisipasi tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu IAIN Bengkulu (Bengkulu), Universitas Dr. Hazairin (Bengkulu), Universitas Riau (Riau), Universitas Maritim Raja



Sumber: BDSP Kemlu RI

Ali Haji (Kepulauan Riau), Universitas Kuningan (Jawa Barat), Universitas Garut (Jawa Barat), Universitas Jember (Jawa Timur), LSPR (DKI Jakarta), Universitas Sebelas Maret (Jawa Tengah), Universitas Pendidikan Nasional (Bali), Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan), Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau (Sulawesi Tenggara), dan Universitas Pattimura (Maluku).

Pada kegiatan ini, masing-masing PSA membahas isu-isu dari salah satu Pilar Kerja Sama ASEAN, baik Pilar politik-keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya yang menjadi fokus perhatian dari kajian masing-masing PSA.

Pada kesempatan ini, PSA Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) menggelar *talkshow* dengan tema "the ASEAN Socio-Cultural Community: Gender and Youth Empowerment". Pada *talkshow* tersebut, Ketua PSA Undiknas, Anak Agung Mia Intenilia, membahas secara komprehensif berbagai inisiatif dan komitmen yang telah dilakukan oleh ASEAN dalam bidang gender, antara lain ASEAN He for She; ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women; dan Online Consultation on the ASEAN Gender Outlook; serta inisiatif dan komitmen di bidang kepemudaan, yakni ASEAN Youth Interfaith Camp; ASEAN Youth Video Contest; dan ASEAN Youth Social Journalism. Melalui komitmen ini, PSA Undiknas berharap ASEAN dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat

dan sebaliknya, masyarakat juga dapat memberikan dukungan penuh terhadap ASEAN, terlebih di usianya yang ke-53 pada saat ini dan masa mendatang

Puncak peringatan ASEAN Day ke-53 ditandai dengan wawancara eksklusif Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI), Retno Marsudi, di *Kompas TV* pada 8 Agustus 2020. Dalam wawancara tersebut, Menlu RI memberikan pandangannya mengenai ASEAN yang telah menginjak usia ke-53 tahun. Selama lebih dari setengah abad, ASEAN telah menunjukkan perannya sebagai lokomotif serta memainkan peran yang sentral dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya capaian ASEAN. Stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara telah berdampak positif terhadap kondusifnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pada ASEAN Day ke-53 ini, ASEAN tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti meningkatnya rivalitas di antara negara-negara besar; situasi pandemi Covid-19; dan dampak sosio-ekonomi akibat situasi pandemi. Karena itu, ke depannya tantangan yang akan dihadapi ASEAN akan semakin banyak dan semakin bervariasi. Persatuan merupakan salah satu modalitas yang perlu dijunjung tinggi oleh ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan di kawasan. Dalam menghadapi tantangan di kawasan, Indonesia hendak

mengingat ASEAN arti penting dari deklarasi Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang mengandung prinsip-prinsip persatuan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan dan dunia internasional. ASEAN juga harus terus menjaga relevansinya bagi masyarakat, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang cenderung dinamis, agar masyarakat dapat merasakan manfaat konkret dari ASEAN.

Negara anggota ASEAN juga perlu memegang teguh prinsip solidaritas dan soliditas seperti telah tercermin dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sejak munculnya *coronavirus* di Wuhan, Tiongkok, Menteri Luar Negeri ASEAN dan Tiongkok telah melakukan pertemuan pada 15 Februari 2020 guna membahas kerja sama dalam pencegahan penyebaran virus tersebut. Sedangkan pada tingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, ASEAN telah menggelar Special ASEAN Summit on the Covid-19 Pandemic dan Special ASEAN Plus Three (APT) Summit on the Covid-19 pada 14 April 2020. Pertemuan telah menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain mengalokasikan 10% dana Asian Development Bank (ADB) untuk menangani pandemi Covid-19; melakukan perlindungan bersama antaranggota ASEAN; menjajaki pembentukan Pusat Koordinasi Penanganan Darurat Kesehatan Publik. Indonesia juga telah mengusulkan pembentukan ASEAN Travel Bubble, yang kemudian telah diadopsi pada Pertemuan KTT ASEAN ke-37, pada 12 November 2020, dengan nama ASEAN Travel Corridor Arrangement guna memulihkan performa ekonomi pascapandemi Covid-19 yang tetap mengindahkan protokol kesehatan.

"Pandemi Covid-19 menyadarkan kita perlunya memperkuat kerja sama di bidang kesehatan; infrastruktur yang kuat untuk kerja sama kesehatan; dan membangun sistem untuk mendukung *response and preparedness* untuk menghadapi *public health emergencies* yang akan terjadi di masa mendatang", ucap Menlu RI.

# INNOVATIVE INVESTING ON WOMEN ENTREPRENEURS

**Yuliana Riana Prasetyawati, M.M.**  
 Head of Centre for ASEAN Public Relations Studies  
 LSPR Communication & Business Institute

**“A woman with a voice is, by definition, a strong woman”. Wise words from Melinda Gates, perfectly describes how women need to raise their voices to remove their obstacles.**

The issue of women has always been an interesting topic to discuss as part of the global challenges we’re facing today. Women entrepreneur is an important topic when talking about investing in women in Association of Southeast Asia Nations (ASEAN).

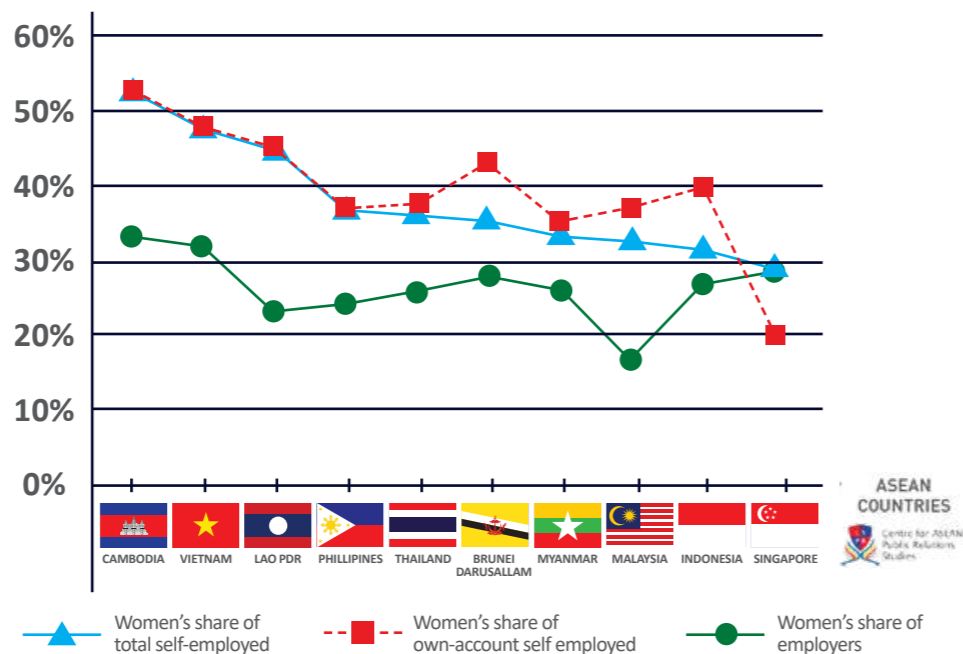
Women entrepreneurship is the main key driver of innovation, growth and employment. The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Report (2018) states that there are 61.3 million women who own and run businesses in ASEAN. Entrepreneurship enables women to empower themselves and contribute to an inclusive and sustainable development. The existence of ASEAN as one entity of the economic powers

in the world with a market of 668 million people (2019) will also open up opportunities for women to develop their businesses.

Women entrepreneur is an innovative approach in investing, women’s participation in women’s economic empowerment in ASEAN. The average percentage of women entrepreneurs in ASEAN is around 30 percent to 50 percent. Cambodia, Vietnam

and Laos are the three ASEAN countries with the highest level of women entrepreneurship. Therefore, various promotional efforts are still needed to support women’s choices for entrepreneurship. The ASEAN Economic Community (AEC) has also increased it’s focus on supporting women’s entrepreneurship, particularly in the context of the ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025.

**FIGURE 1. SHARE OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN ASEAN**



Sources: *Fostering Women’s Entrepreneurship: Transforming Prospects, Transforming Societies, United Nations Publication, 2017*



Sumber: Shutterstock

The main business fields that women entrepreneurs in ASEAN are engaged in are retail trade, hotels and restaurants (see table 1). In Thailand, women prefer to do business in the agriculture, forestry and fishery

sectors, while women in Indonesia and Malaysia tend to like doing business in the manufacturing area. What about Singapore? Women in Singapore enjoy doing business in sectors related to health, education and social services.

However, to unlock the full potential of women entrepreneurs in ASEAN, there are a number of cultural, employment and economic barriers that needs to be addressed. Related to cultural values, the dominant Eastern culture places the main role of women as wives and mothers. There are social and cultural expectations for women’s roles in the household, as well as traditional views of suitable work for men and women. This surely will limit the choices for women to participate in economic activities.

Access to finance is also a major and common barrier faced by women entrepreneurs in Southeast Asian countries. In addition, many women entrepreneurs rely on limited knowledge of available financial tools and services. They tend to lack confidence in negotiating loans (due to financial literacy needs) and have no credit history and track record in business.

Moreover women entrepreneurs in ASEAN also have limited access to education and training resulting in a lack of knowledge and skills in starting, managing and developing

**TABLE 1. WOMEN ENTREPRENEUR SECTOR IN ASEAN**

Woman Entrepreneur Sector in ASEAN	INDONESIA	MALAYSIA	PHILIPPINES	SINGAPORE	THAILAND	VIETNAM
Agriculture, Forestry, Fishing	2.1	5.6	2.1	0.0	19.7	1.7
Mining, Construction	2.6	3.4	1.1	7.1	0.9	0.5
Manufacturing	11.2	12.4	8.0	9.5	6.0	2.7
Utilization, Transport, Storage	1.4	0.0	1.1	0.0	0.9	1.0
Wholesale Trade	1.8	11.2	5.9	4.8	4.9	4.2
<b>Retail Trade, Hotels &amp; Restaurants</b>	<b>74.2</b>	<b>51.7</b>	<b>74.9</b>	<b>47.6</b>	<b>55.8</b>	<b>78.6</b>
Information and Communication	0.1	0.0	0.0	2.4	0.5	1.0
Financial Intermediation, Real Estate Activities	1.2	1.1	3.2	7.1	0.9	2.7
Professional Services	1.5	2.2	0.5	4.8	0.0	0.2
Administrative Services	0.4	1.1	2.7	0.0	0.5	0.5
Government, Health, Education, Social Services	3.1	11.2	0.5	16.7	9.4	5.9
Personal/Consumer Service Activities	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0

Source: *Fostering Women’s Entrepreneurship: Transforming Prospects, Transforming Societies, United Nations Publication, 2017*



businesses. Significant gaps are seen in formal knowledge of marketing, management and good business practices. Lack of knowledge and skills in the field of technology is also an obstacle for women to do digital-based businesses.

Building a network of women's business centers Southeast Asia can be the solution to provide business development support to women entrepreneurs and meet the needs of women-friendly environment. This is answered by the formation of ASEAN Women's Entrepreneurs Network (AWEN) which is a network of business women in the region. The aims are to share knowledge and experiences, develop and propose

initiatives to promote economic and trade activities in order to improve gender equality, empower and strengthen entrepreneurial skills for women in ASEAN. It is hoped that AWEN's presence will help create an environment that supports women-led businesses and supports women's entrepreneurship in Southeast Asia.

In addition, ASEAN countries also have women's business associations which nationally (table 1) will strengthen women's entrepreneurial skills and help create a conducive environment for women to do business. Women's business associations have shown to strengthen the role of women entrepreneurs in Cambodia, Malaysia, Vietnam and Indonesia.

Various efforts have been made by ASEAN to overcome obstacles and to open opportunities for women in the region to gain entrepreneurship needs, such as increasing financial access for women entrepreneurs through subsidized loans and other financial incentives and addressing gender-based discrimination. ASEAN has also made efforts to develop human resources in managing business ventures through the ASEAN On-line Academy.

Support for entrepreneurship is also provided by ASEAN partners. For example, Japan has contributed significantly to increasing the capacity of ASEAN small and medium enterprises (SMEs), while China and Canada have established partnerships for SMEs development. The United States has also supported WeCreate centers in Cambodia and Vietnam which launched female-owned start-ups.

Mastery in information and communication technology (ICT) is one of the main keys for women entrepreneurs to innovate; accessing financial services and support; access market information and opportunities; and networking with fellow entrepreneurs. In this regard, the various strategic actions and work plans of ASEAN set specific points for implementation by the ASEAN member governments to improve the position of women entrepreneurs, including in areas such as access to ICT and finance as well as improving business skills. The key among them is the 2016-2025 Strategic Action Plan for ASEAN SME Development.

The government of ASEAN member states (AMS) has made several e-ASEAN commitments that must be obeyed. These include: 1) Ensuring that the required regional Information and Communication Technology (ICT) infrastructure is in place; 2) Expanding e-commerce and e-government facilities and services; 3) Liberalization of trade in products, services and ICT investment and 4) Reducing the digital

divide, within and between ASEAN countries, as well as the gender-based digital divider.

The government of AMS can also facilitate the use of ICTs for business development and innovation for women entrepreneurs, by: 1) adopting policies that support creativity and the development of innovative technologies, including protection of intellectual property rights and free cross-border data flow; 2) ensure that ICT skills development is part of the school curriculum, with special attention to access by girls; and 3) targeting ICT training opportunities for women entrepreneurs at all levels.

Several women entrepreneurs in ASEAN have successfully used ICT to develop their business ventures. A Malaysian entrepreneur, Sylvia Lin, founded Shoppr, an online store aggregator app that gives users clothing recommendations, in 2013.

Now, Shoppr has become a platform influencing women all over the world regarding fashion.







In the Philippines, Reese Fernandez-Ruiz, founder of the largest social enterprise in the country, has succeeded in helping underprivileged women living in villages to make various accessories from traditional fabrics which are then sold through Rags2Riches. Now, Rags2Riches, will be expanding to North America with an online shop operated in partnership with Canada.

While di Indonesia, Diajeng Lestari has successfully developed an e-commerce called Hijup, which sells clothing and accessories for Muslim women since 2011 and is currently penetrating the international market. In 2020, other entrepreneur, Prita Kemal Gani, CEO & Founder of the LSPR Communication & Business Institute, also realized the importance of supporting the

role of women in economic activities by establishing LSPR Plaza, a digital showcase platform that can be a place for entrepreneurial activities for the families of LSPR employees, including the wives of the employees. This will help increase the role of women as drivers of the family economy.

Finally, tenacity and hard work are two characteristics that women must have to start and develop a business, said by Lilis Komariah, CEO of Limas Land Group, who was awarded the ASEAN Women Entrepreneurs Network for the 2019 Best ASEAN Female Entrepreneur. But all of those above are not enough to push women's success in business sector. As Lilis Komariah said, tenacity and hard work are two characters that women should have to start and develop a business. Lilis Komariah is CEO of Limas Land Group, who was awarded as 2019 Best ASEAN Female Entrepreneur by ASEAN Women Entrepreneurs Network.

**TABEL 2.**  
**WOMEN BUSINESS ASSOCIATION IN ASEAN**

	Country	Women Business Association
1	 INDONESIA	Indonesian Business Women's Association (IWAPI)
2	 THAILAND	Office of Women's Affair and Family Development: Ministry of Social Development and Human Security
3	 PHILIPPINES	The Women's Business Council of the Philippines
4	 MALAYSIA	Associations of Women Entrepreneurs Network of Malaysia (WENA)
5	 SINGAPORE	Singapore Council of Women's Organization (SCWO)
6	 VIETNAM	VietNam Women Entrepreneurs Council (VWEC)
7	 MYANMAR	Myanmar Women Entrepreneurs Association
8	 CAMBODIA	Cambodia Women Entrepreneurs Association (CWEA)
9	 LAO PDR	Lao Business Women's Association
10	 BRUNEI	Women's Business Council of Brunei Darussalam



Sumber: Shutterstock

# Pojok Bahasa BAHASA KHMER

A. Yathriba  
Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh



No.	KHMER LATIN	KHMER	INDONESIA
1.	Mi (tver pi ongko)	មី (ធ្ម្មើរើពី ងងុត)	Mi beras
2.	Trey	ត្រី	Ikan
3.	Saj moan	សាច់ ម៉ាន់	Daging ayam
4.	Saj ko	សាច់ គោ	Daging sapi
5.	kari	ការី	Kari
6.	Sondaek kuor	សណ្តែក ត្រី ក្រូច	Kacang panjang
7.	Deu-m chhu-k	ដើម ឈូក	Batang Teratai
8.	Sleuk cek	ស្រូវ ក្រចក	Daun pisang
9.	Trosok	ត្រូវ ក	Mentimun
10.	Kreung p'som	គ្រូង ឃ្មុំ	Bumbu
11.	P'ka	ផ្កា	Bunga
12.	M'teh	ម្រូង ត្រី	Cabai
13.	Sla'p prie	ស្រាប ព្រា	Sendok
14.	So-m	សម	Garpu
15.	Chongkeuh	ចង្កឹះ	Sumpit
16.	cha-n ko-m	ចាន ក្រូច	Mangkok
17.	Cha-n	ចាន	Piring
18.	Chhut atau muk m'hop	ជុត ឬ មុខ ម្ហូប	Porsi
19.	keo	កែវ	Gelas
20.	Ch'nganh	ឆ្មារ ញី	Enak
21.	Mien k'tih	មីន ខ្នុះ	Gurih
22.	Khlie-n	ឃ្មុំ ឆាន	Lapar
23.	Pi'sa-, hop, nham	ពិសារ ហ្មុច ញី	Makan
24.	Pi'sa- tirk, nham tirk, pheuk tirk	ពិសារ ទឹក ញី ទឹក ផឹក ទឹក	Minum
25.	Che'e-t	ឆ្មុត ត្រី	Kenyang



26.	He-r/L	ហ៊ែរ	Pedas
27.	Aha- pe-l prirk	អាហារ ពេល ព្រឹក	Sarapan
28.	Teuk sot	ទឹក ស្អុយ	Air putih
29.	Kafe	កាហ្វេ	Kopi
30.	Tirk ko-k	ទឹក កក	Es
31.	Tae	តៃ	Teh
32.	Kh'nyom	ខ្មុំ	Saya
33.	neak	នាក់	Kamu
34.	Bongbros/ bongrey	បង ប្អូន/បង ស្រី	Mas/Mbak
35.	P'on	ប្អូន	Adik
36.	Suo sdey	សួស្តី	Halo
37.	Sok sabai chea te?	សុខ សប្បុរស ជាទេ?	Apa kabar?
38.	Sok sabai	សុខ សប្បុរស	Kabar baik
39.	Orkun	អរគុណ	Terima kasih
40.	Som toh	សុំ ទោស	Maaf
41.	So-m atyea srai, so-m anu' nya-t/ cumreap lea	សូម អញ្ជើញ ទេ/សូម សូម អញ្ជើញ ទេ/អញ្ជើញ	Permisi
42.	Chong teuv na?	ចង់ ទៅ ណា?	Mau kemana?
43.	Nih	នេះ	Ini
44.	Nuh	នោះ	Itu
45.	Ponma-n?	ប៉ុន្មាន	Berapa?
46.	P'sar	ផ្សារ	Pasar
47.	M'hop aha-	ម្ហូប អាហារ	Kuliner
48.	Chomnoj piseh	ចំណុច ពិសេស	Khas
49.	Propey ni-	បុរាណ ណី	Tradisional
50.	Arun suo sdey	អរណ សួស្តី	Selamat pagi
51.	Tivea suo sdey	ទិវា សួស្តី	Selamat siang
52.	Sayon suo sdey	សាយ ទូត សួស្តី	Selamat sore
53.	Rea trey suo sdey	រាត្រី សួស្តី	Selamat malam
54.	Chumreap lea	ជំរាប ទេ	Sampai jumpa
55.	Sok sabai ta-m pleuv	សុខ សប្បុរស ជាទេ	Selamat jalan





# MELTING POT: WARNA-WARNI BUSANA ASIA TENGGARA

Janita Jaya, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN



Wanita Filipina mengenakan pakaian tradisional *baro't saya*.

Sumber: shutterstock

**Keragaman busana Asia Tenggara ditunjukkan dengan variasi warna yang hidup, aksesoris dan perhiasan gemerlap, motif kain sarat makna, serta akulturasi budaya yang menambah kekayaan ragam tata busananya.**

**B**usana di Asia Tenggara juga memperlihatkan persamaan budaya serumpun di antara negara-negara di kawasan ini. Pada majalah Masyarakat ASEAN edisi ini, kita akan mengenal lebih jauh beberapa busana nasional dari empat negara anggota ASEAN, yaitu Filipina, Laos, Myanmar, dan Singapura.

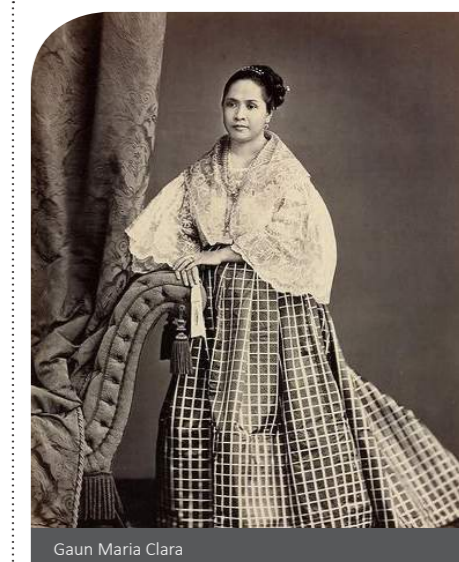
## FILIPINA

Busana tradisional Filipina yang sangat dikenal di antaranya *barong tagalog* dan *baro't saya*. Kedua pakaian ini merupakan perpaduan budaya Filipina dan Spanyol. *Barong tagalog*, atau dalam bahasa Spanyol *camisa fuera*, adalah pakaian nasional Filipina yang dikenakan oleh pria. Atasan *barong tagalog* umumnya berupa kemeja berbahan tipis berwarna putih dengan motif sulam berwarna senada seperti atasan brokat, dipakai sebagai luaran dari kaus, dan dipadukan dengan celana panjang berwarna gelap. Pada 1975, Presiden Ferdinand E. Marcos menetapkan *barong tagalog* sebagai pakaian nasional Filipina dan menetapkan 5 sampai 11 Juni sebagai minggu peringatan *barong tagalog*.

*Baro't saya* adalah pakaian nasional wanita Filipina. *Baro't saya* biasanya terdiri dari atasan blus (*baro* atau *camisa*), rok panjang (*saya* atau *falda*),

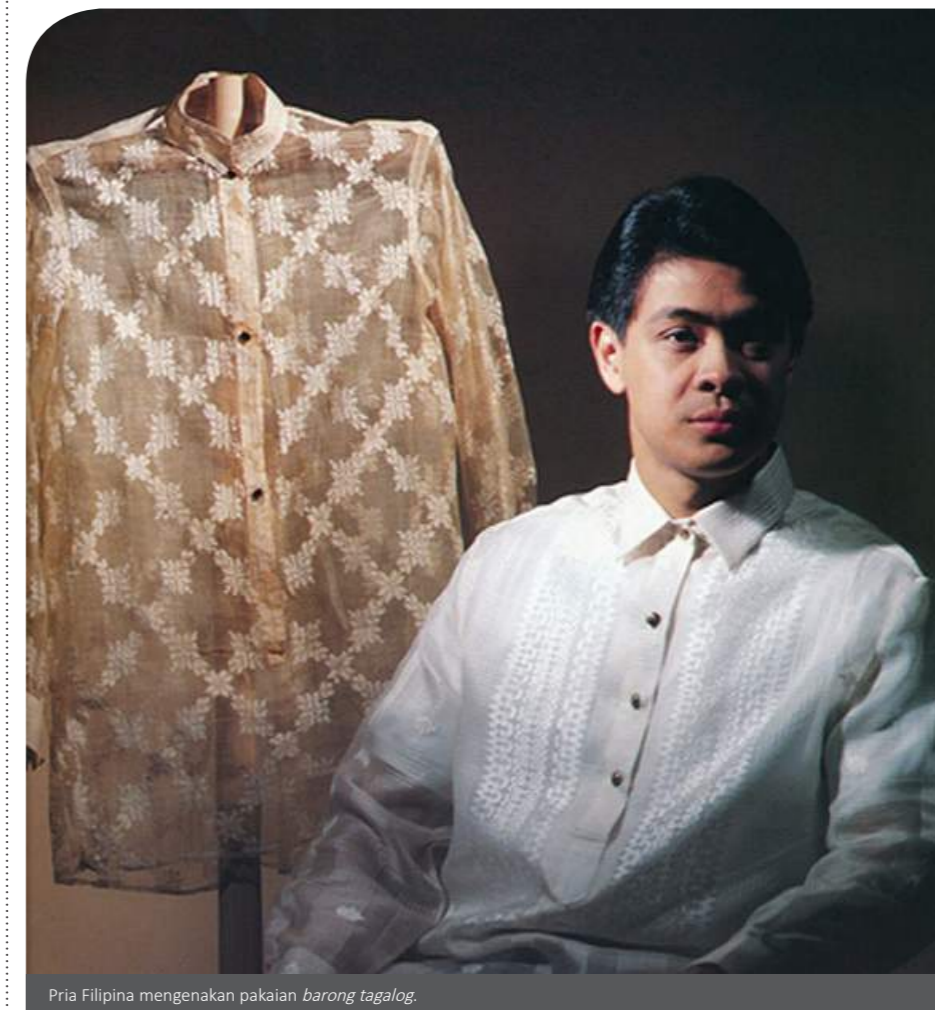
kain lebar yang dikenakan menyelimuti bahu (*pañuelo*, *fichu*, atau *alampay*), dan kain lapisan tambahan yang dikenakan di atas rok (*tapis* atau *patadyong*). Salah satu varian dari pakaian *baro't saya* adalah gaun Maria Clara, nama ini diambil dari nama protagonis dalam novel terkenal Filipina berjudul *Noli Me Tángere* karya José Rizal. Ini adalah pakaian formal, elegan, serta aristokratik. Versi gaun terusan dari *baro't saya* Maria Clara ini dikenal dengan nama *terno*, yang dikenal dengan kekhasan model lengan berpotongan lebar seperti kupu-kupu serta sangat populer di awal abad ke-20.

Filipina juga memiliki pakaian tradisional lainnya, salah satunya adalah kain *malong* yang berasal dari Mindanao dan Kepulauan Sulu. Kain *malong* tampak serupa seperti kain sarung yang dihias dengan motif tradisional dan umumnya



Gaun Maria Clara

dibuat dengan teknik tenun. Kain ini dapat digunakan baik oleh pria dan wanita sebagai terusan yang dililitkan di badan, maupun sebagai luaran atau *outer*.



Pria Filipina mengenakan pakaian *barong tagalog*.

Sumber: primer.com

Sumber: philippinefolkifemuseum.org

Sumber: shutterstock



Wanita mengenakan pakaian tradisional Laos *xout lao*.

**LAOS**

*Xout Lao* yang secara harfiah berarti pakaian Lao adalah pakaian nasional Laos. Busana tradisional wanita Laos umumnya terdiri dari setelan kain *sinh*, atasan *blus suea pat*, dan selendang *pha biang* atau disebut juga *sabai* yang menjuntai menutupi sebelah bahu. Setelan busana dengan *sabai* juga dijumpai di negara-negara Asia Tenggara lainnya, khususnya di wilayah Indochina seperti Kamboja dan Thailand. Para wanita Laos biasanya menggulung rambut mereka menjadi cepol di atas kepala dan mengenakan *headpiece* bernuansa emas. Kain *sinh* merupakan kain tenun dari bahan sutra atau katun yang dihias dengan motif geometri yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian atas kain (*hua sinh*), bagian badan kain (*phuen sinh*), dan bagian bawah/hem kain (*tin sinh*). *Blus suea pat* berupa atasan dengan model pakaian yang dililitkan menutupi tubuh

Sumber: shutterstock



Pakaian *xout lao*.

dan diikat dengan pita di samping. Desain kerah silang pada blus *suea pat* kemungkinan merupakan pengaruh mode Tiongkok pada masa Dinasti Ming, seperti pakaian hanfu.

Adapun pria Laos mengenakan busana tradisional yang terdiri dari celana lebar *baggy* yang disebut *salong*, kadang ditambah dengan kaus kaki putih panjang dipadu dengan kemeja dan selendang *pha biang*. *Salong* biasanya dikenakan di pinggang dan dapat diikat atau dihias dengan aksesoris seperti ikat pinggang. Pola motif dan warna pada bagian *hem salong* dapat bervariasi dengan bentuk geometri.



Pasangan yang mengenakan pakaian tradisional Laos *xout lao*.

Sumber: shutterstock

**MYANMAR**

Busana tradisional Myanmar adalah *longyi*, yaitu rok panjang atau sarung, di mana busana ini dikenakan oleh pria dan wanita. Penggunaan sarung ini sebagai busana tradisional menggantikan kain panjang tradisional yang dulu dipakai oleh warga Myanmar, yaitu *paso* yang dikenakan oleh laki-laki dan *htamein* yang dikenakan oleh perempuan. Umumnya, pria memakai *longyi* dengan motif kotak-kotak berwarna gelap sedangkan wanita memakai *longyi* warna-warni dengan berbagai tekstur dan motif.

Pakaian tradisional Myanmar dapat dipadu dengan kemeja atau blus *eingyi*. Blus *eingyi* untuk wanita terdiri dari dua model yaitu *yzinzi*, blus dengan kancing di depan; dan *yzinbon*, blus dengan kancing di bagian samping. Salah satu busana tradisional wanita Myanmar adalah *htaingmathein*, yaitu jaket sepanjang pinggul tanpa kancing, kadang bervariasi dengan potongan bagian bawah jaket yang melebar seperti model *peplum* dengan motif sulam berpayet. *Htaingmathein* biasanya digunakan sebagai luaran kemben atau *yinkhan*, dan dipadu dengan sarung *longyi*. Pakaian *htaingmathein* kini tetap populer sebagai pakaian adat untuk pernikahan tradisional Myanmar.

Sumber: shutterstock



Wanita mengenakan busana tradisional Myanmar *longyi*.



Wanita mengenakan busana tradisional Myanmar *longyi*.

Sumber: shutterstock



U Thant, Sekretaris Jenderal PBB ke-3 (periode 1961-1971). Sumber: U Thant: The Search for Peace (1966)

Untuk atasan pria, pemakaian *longyi* umumnya dipadu dengan *taikpon eingyi*. *Taikpon eingyi* adalah jaket tradisional Myanmar yang mendapatkan pengaruh dari pakaian daerah *Manchu* di Tiongkok yaitu magua. Jaket ini biasanya dikenakan secara rangkap dengan kemeja putih leher tinggi di dalamnya. Penutup kepala kain untuk pria khas Myanmar, gaung baung, saat ini hanya digunakan untuk perayaan dan acara formal.



Pasangan yang mengenakan busana *longyi*.

Sumber: shutterstock

## SINGAPURA

Walaupun Singapura adalah negara dengan wilayah relatif kecil, tempat ini merupakan *melting pot* dari beragam budaya, yaitu Melayu, Tionghoa, India, dan sebagian kecil budaya Barat atau Eurasians. Oleh karena itu, pakaian tradisional di Singapura sangat beragam tetapi tetap menunjukkan persaudaran serumpun dengan negara-negara tetangganya, seperti baju kurung yang merupakan pakaian adat di Malaysia; Brunei Darussalam; dan Indonesia, khususnya Sumatera. Baju kurung digunakan baik oleh wanita maupun pria, yang umumnya versi pria disebut juga dengan istilah baju melayu. Baju kurung berupa blus panjang yang dipadu dengan rok atau celana panjang, biasanya dilengkapi dengan kerudung atau selendang. Sedangkan untuk baju melayu, terdiri dari pakaian atasan panjang dengan celana panjang dan biasanya dipadu dengan sarung atau kain yang menutupi sepanjang lutut. Untuk pakaian atasan pria, baju melayu memiliki dua varian, yaitu baju teluk belanga berupa atasan tanpa kerah dan baju cekak musang yang berupa atasan kerah tinggi.

Pakaian adat peranakan juga menambah keragaman busana nasional Singapura. Busana *sarong kebaya* kerap kali dijumpai dalam budaya peranakan antara Melayu dan Tionghoa, pakaian ini berupa atasan kebaya yang dipadu dengan kain bermotif atau batik. Pakaian serupa



Wanita Singapura mengenakan pakaian tradisional sarong kebaya.

Sumber: shutterstock

juga dijumpai di negara-negara Asia Tenggara lainnya, khususnya Indonesia dan Malaysia. Yang membedakan setelan sarung dan kebaya di wilayah Asia Tenggara umumnya adalah kombinasi warna dan motif tradisional pada kain yang dikenakan. Motif dapat menunjukkan kekhasan budaya daerah di masing-masing negara. Salah satu contoh yang iconic dari *sarong kebaya* adalah seragam dari awak kabin Singapore Airlines.

Selain itu, di Singapura juga kerap kali dijumpai pakaian adat dari etnis lainnya, seperti *cheongsam* atau *qipao* yang berasal dari budaya Tionghoa, serta pakaian *sari* yang berasal dari budaya India. *Cheongsam* umumnya



Pasangan yang mengenakan pakaian tradisional etnis Tionghoa.

Sumber: shutterstock

adalah baju terusan *slim fit*, berkerah tinggi, dan berbahan sutra dengan warna terang yang dihiasi motif beragam seperti bunga-bunga. Variasi lainnya dari baju *cheongsam* adalah panjang roknya, serta memiliki slit atau potongan di sisi rok. Pakaian adat yang berasal dari India, seperti *sari*, *salwar kameez* atau *salwar kurta* juga sering dijumpai di Singapura. Sari terkenal dengan keunikan kainnya yang dililikan di badan dan disandarkan di bahu, sedangkan *salwar kameez* berupa atasan tunik panjang dengan celana *baggy* yang memiliki varian untuk wanita dan pria, biasanya untuk wanita ditambah dengan selendang panjang.



Awak kabin Singapore Airlines mengenakan pakaian tradisional sarong kebaya.

Sumber: shutterstock



Sumber: Dok. Pribadi

# NUM BANH CHOK, MI KHAS KAMBOJA

A.Yathriba, Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh

**Siapa yang tak kenal mi? Makanan berbentuk adonan tipis dan panjang ini dikenal di seluruh dunia. Setiap negara memiliki variasi mi masing-masing, tidak terkecuali dengan Kamboja.**

**N**egara di Asia Tenggara yang terkenal akan kuil Angkor Wat ini juga memiliki mi khas yang bernama *num banh chok*. Jika di Indonesia makan tidak lengkap tanpa sambal dan kerupuk, maka di Kamboja makan tidak lengkap tanpa lalapan daun segar. Mi yang terbuat dari bahan dasar tepung beras ini dihidangkan dengan lauk sayur segar berupa mentimun, jantung pisang, batang bunga lili dan bumbu segar seperti basil dan *mint*.

Selain itu, yang membuat mi ini unik adalah hidangan bunga segar yang



Sumber: Dok. Pribadi

dapat dimakan, yaitu *pka snor* atau sesbania dan *pka komplouk* atau bunga eceng gondok. Berbeda dengan di Indonesia yang menggampang bunga adalah makanan makhluk halus, di Kamboja beberapa bunga segar biasa menjadi lauk makanan.

Untuk kuahnya, *num banh chok* biasa disajikan dengan kuah dari ikan. Namun demikian, terdapat variasi lain yaitu *num banh chok* dengan kuah kari ayam. Penyajian *num banh chok* pun dapat berbeda dari daerah satu dengan daerah lain. Penggunaan kuah dari ikan maupun dari kari ayam ini membuat rasa *num banh chok* yang berbeda, apalagi jika dibandingkan dengan mi dari negara tetangga seperti *pad thai* dari Thailand ataupun *mi pho* dari Viet Nam.

*Num banh chok* dapat ditemukan di pinggir jalan oleh para penjual ataupun di beberapa rumah makan ternama. Harganya pun beragam dari 3000 – 40.000 KHR (sekitar Rp 10.000 – Rp. 127.000), tergantung di mana tempat membelinya.

Karena rasanya yang hangat dan gurih, *num banh chok* biasa dimakan oleh warga Khmer sebagai menu sarapan pagi. Meskipun demikian, dengan ditemani oleh secangkir *café doh koh toek gok* atau es kopi susu, mi ini juga masih cocok untuk dinikmati sepanjang waktu.



Sumber: Dok. Pribadi

# BOKATOR: SENI BELA DIRI PURBA YANG TERANCAH PUNAH

Medila Putri, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN



Sumber: Shutterstock

Sumber: The documentary Surviving Bokator ©



## Masyarakat Asia Tenggara sejak lama mengenal berbagai seni bela diri yang lahir dan berkembang di kawasan ini.

Salah satu seni bela diri kuno yang dikenal masyarakat di Asia Tenggara adalah bokator yang berasal dari Kamboja. Orang Angkor pada abad ke-9 sampai ke-15 mengartikan kata bokator sebagai “memukul singa”.

Bokator mempraktikkan sistem pertarungan jarak dekat, dengan senjata utama siku dan lutut. Seni bela diri ini dahulu tidak digunakan untuk acara pertunjukan melainkan untuk perang, sehingga tujuan dari bokator adalah untuk memenangkan pertempuran. Gerakan-gerakan yang ada pada bokator antara lain serangan dengan siku dan lutut, tendangan pada tulang kering, serta bertarung di atas tanah.

Gerakan bokator, pada masa kini, dilakukan untuk membuat lawan menyerah dan mengaku kalah. Namun pada zaman Angkor, gerakan bela diri ini dimasukkan untuk melumpuhkan lawan hingga tewas. Petarung bokator

juga boleh menggunakan senjata tambahan seperti batang bambu, tombak, dan krama yaitu kain asli Kamboja. Gerakan bokator terinspirasi dari gerakan binatang seperti harimau, kuda, elang dan naga.

Pada zaman sekarang, para master bokator menggunakan kain krama pada bagian pinggang dan tali satin berwarna merah dan biru di sekitar pinggang dan lengan. Warna kain krama yg diikat di pinggang menunjukkan level dari petarung tersebut, dari yang terendah putih, hijau, biru, merah, coklat dan hitam sebagai level tertinggi.

Untuk mendapatkan krama warna putih, petarung bokator harus mempelajari seratus gerakan, sedangkan untuk memperoleh krama hitam petarung mesti mempelajari 10 ribu gerakan. Wow!



Sumber: Shutterstock

Menyadari pentingnya kekayaan dan warisan budaya ini, pemerintah Kamboja menjadikan bokator sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa kelas 7 sampai 9.

Kim Sean, master bokator yang berhasil membangkitkan kembali keagungan seni bela diri ini, sangat senang melihat semakin banyak anak muda menyukai dan berperan dalam penyebaran bokator.

Di Kamboja, pertandingan bokator dilakukan secara regular seperti pada SEA GAMES di Phnom Penh. Para petarung berkompetisi dalam dua kategori, Teknik dan Praktik Bertarung. Pada kategori Teknik, peserta lomba menunjukkan tvari nya, yaitu bentuk tubuh saat mempraktikkan gerakan-gerakan bokator dengan tangan kosong atau menggunakan senjata. Juri akan memperhatikan estetika gerakan dan kualitas dari peserta.

Sedangkan untuk kategori Praktik Bertarung, dua peserta akan bertarung dalam lingkaran dengan waktu 5 menit untuk satu ronde ditemani dengan music khusus bokator. Pukulan tidak boleh ditujukan kepada leher, punggung, genital dan pada saat lawan terbaring di tanah, wasit akan langsung menghentikan pertandingan jika petarung ada yang tidak bergerak. Petarung juga menari setiap mereka akan memulai fase pertarungan berikutnya, hal ini dilakukan berdasarkan legenda lama yang mengatakan bahwa petarung yang berhadapan dengan binatang akan menari untuk membuat hewan tersebut lengah.

# BALI DEMOCRACY STUDENTS CONFERENCE IV, 2020



Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri membuka kegiatan Bali Democracy Students Conference IV, Bali, 21 Oktober 2020.



Duta Besar RI untuk AS Muhammad Lutfi memberikan Keynote Speech pada BDSC IV, Bali 21 Oktober 2020



Generasi muda berpartisipasi secara virtual dalam kegiatan Bali Democracy Students Conference IV, Bali, 21 Oktober 2020.



Panel 1 BDSC IV dengan tema Youth Perspective on How Democracy is Dealing with Covid-19 Pandemic menghadirkan pembicara Edbert Gani Suryahudaya-Researcher CSIS, Ridwansyah.



Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) Kemlu, Bapak Khasan Ashari, selaku Chairperson of Steering Committee menyampaikan apresiasi dan menutup kegiatan BDSC 2020



Moderator kegiatan membacakan Rekomendasi BDSC yang akan disampaikan pada Kegiatan Bali Democracy Forum, 10 Desember 2020

Sumber: Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri

# POTENSI WANITA DAN PEMUDA SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DI ASEAN



DIREKTORAT JENDERAL  
KERJA SAMA ASEAN  
MENGUCAPKAN

SELAMAT  
HARI RAYA NATAL 2020  
&  
SELAMAT  
TAHUN BARU 2021

# MAJALAH MASYARAKAT ASEAN *GOES DIGITAL*

Majalah Masyarakat ASEAN Hadir Dalam Format Digital yang Dapat Diakses Melalui:

## SITUS KEMENTERIAN

[www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)

- Ketik “Majalah Masyarakat ASEAN” pada kolom cari atau search.
- Klik Edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang ingin ada baca.

## SITUS SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN-INDONESIA

<http://setnas-asean.id/>

- Cari menu “referensi” dan pilih “Majalah Masyarakat ASEAN”.
- Klik Edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang ingin ada baca.

## MEDIA SOSIAL



@asean\_ri



AyokenaliASEAN  
ASEAN Indonesia

## APLIKASI GOOGLE PLAY



- Pilih menu Books dan ketik “Ditjen Kerjasama ASEAN” pada kolom pencarian.
- Klik Edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang anda ingin baca.

